RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH



2026

PROVINSI SULAWESI BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 sebagai salah satu tahapan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi dalam satu periode tahun kedepan. Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara tugas Sekretariat Daerah sebagai penggerak administrasi pemerintahan dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026, serta mampu mendorong tercapainya kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dapat dijadikan sebagai acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 2 Agustus 2025

Plh. Sekretaris Daerah,
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. Herdin Ismail, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 197007011991011004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah..... 40

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. …. 44

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 59

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 102

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 103

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah..... 103

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 106

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2026..... 106

BAB V. PENUTUP 107

5.1 Kaidah Pelaksanaan 107

5.2 Penutup..... 107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	42
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Barat. .	60
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.....	105

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel T-C33 Rumusan Rencana Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Barat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki fungsi strategis dalam memastikan kesinambungan, keselarasan, dan keterukuran antara arah kebijakan jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Renja juga menjadi dasar penganggaran berbasis kinerja serta alat kontrol untuk menilai capaian pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 adalah bagian dari implementasi dokumen Renstra Sekretariat Daerah 2025–2029 yang disusun berdasarkan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Selain itu, dokumen rencana kerja juga mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional, evaluasi tahun sebelumnya, serta realokasi kegiatan dan anggaran.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif, fasilitatif, dan administratif terhadap seluruh organisasi perangkat daerah, Sekretariat Daerah (Setda) memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sekretariat Daerah berperan mengoordinasikan kebijakan, menyusun perencanaan strategis lintas sektor, serta mengelola pelayanan administrasi umum yang menjadi tulang punggung birokrasi pemerintahan daerah.

Peran Setda tidak hanya administratif, melainkan juga strategis dalam menjembatani pelaksanaan visi-misi kepala daerah, memastikan keselarasan antar-OPD, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan teknokratik, dengan memanfaatkan data dan informasi kinerja pembangunan daerah, capaian indikator makro, serta capaian program prioritas Setda
2. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Setda melalui forum diskusi, penyampaian usulan kegiatan, dan sinkronisasi sasaran kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pendekatan politis, dengan mempertimbangkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta prioritas RPJMD/RPD 2025–2029.
4. Pendekatan evaluatif, dengan merujuk pada hasil evaluasi Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra sebelumnya.

Penyusunan Renja ini juga menggunakan prinsip penganggaran berbasis kinerja, dengan menekankan pada keterukuran output dan outcome, serta menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan penyusunan yang terencana, terukur, dan kolaboratif, Renja ini diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi seluruh bagian dalam lingkup Setda untuk berkontribusi secara optimal dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
j. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
p. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 adalah:

a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat;
b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 adalah Sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Berjalan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun berjalan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibagi menjadi 3 (tiga) Asisten yang menaungi 6 (enam) biro yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Pemerintahan dan Kesra	14,073,175,360	11,628,960,971	2,444,214,389	82.63%
2	Biro Hukum	1,400,203,360	1,394,720,877	5,482,483	99.61 %
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1,199,445,360	1,192,512,201	6,933,159	99.42 %
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1,516,741,360	1,497,292,086	19,449,274	98.72%
5	Biro Organisasi	1,290,875,360	1,279,257,397	11,617,963	97.17%
6	Biro Umum	119,607,331,858	118,901,226,562	706,105,296	99.41%

Dari enam biro tersebut jika diakumulasi maka besaran pagu anggaran Sekretariat Daerah adalah 139,087,772,658 dengan realisasi sebesar 135,893,970,094 dan masih menyisakan anggaran 3,193,802,564 sehingga persentase capaian kinerja anggaran tahun 2024 adalah sebesar 97,70 %. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 berjumlah 8 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 2):

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Unit Kerja: Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			952,247,201		144,895,648		165,011,688		234,067,183		398,917,915		942,892,434		99.02%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	10.67	109,220,320	-	25,241,560	-	14,113,980	-	27,295,000	-	41,657,280	-	108,307,820	0.00%	99.16%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	50,255,520	1	9,150,000	1	5,600,000	-	12,595,000	1	22,805,520	3	50,150,520	100.00%	99.79%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	9,606,840	1	5,856,840	-	2,500,000	-	1,250,000	-	-	1	9,606,840	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	11,158,040	-	-	-	-	-	3,750,000	1	7,408,040	1	11,158,040	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	2,734,720	1	2,734,720	-	-	-	-	-	-	1	2,734,720	100.00%	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2,546,720	-	-	-	-	-	-	1	2,546,720	1	2,546,720	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	32,918,480	-	7,500,000	-	6,013,980	-	9,700,000	1	8,897,000	1	32,110,980	100.00%	97.55%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	100	2,197,536	-	-	-	-	-	-	-	2,197,536	-	2,197,536	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2,197,536	-	-	-	-	-	-	1	2,197,536	1	2,197,536	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	104,482,300	-	23,260,000	-	9,450,940	-	42,330,000	-	26,402,860	-	101,443,800	0.00%	97.09%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	76,941,800	-	11,700,000	-	9,450,940	-	27,049,500	1	26,402,860	1	74,603,300	100.00%	96.96%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	27,540,500	2	11,560,000	3	-	-	15,280,500	-	-	5	26,840,500	100.00%	97.46%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	470,000,012	-	81,112,088	-	66,858,612	-	118,236,233	-	201,775,431	-	467,982,364	0.00%	99.57%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	85,376,000	1	10,628,800	-	7,100,000	-	23,791,300	1	43,849,000	2	85,369,100	100.00%	99.99%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	4,840,000	-	-	-	-	-	-	2	4,840,000	2	4,840,000	100.00%	100.00%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	56,655,100	1	12,365,148	-	6,644,652	-	17,008,253	1	20,609,091	2	56,627,144	100.00%	99.95%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	323,128,912	1	58,118,140	1	53,113,960	-	77,436,680	-	132,477,340	2	321,146,120	100.00%	99.39%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	101,509,033	-	-	-	56,708,000	-	-	-	42,400,000	-	99,108,000	0.00%	97.63%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	101,509,033	5	-	1	56,708,000	-	-	4	42,400,000	10	99,108,000	100.00%	97.63%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	164,838,000	-	15,282,000	-	17,880,156	-	46,205,950	-	84,484,808	-	163,852,914	0.00%	99.40%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	122,910,000	1	11,800,000	1	14,980,156	1	42,802,950	1	52,568,308	4	122,151,414	100.00%	99.38%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	18,540,000	1	-	-	2,900,000	-	1,800,000	1	13,680,000	2	18,380,000	100.00%	99.14%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	23,388,000	1	3,482,000	1	-	-	1,603,000	1	18,236,500	3	23,321,500	100.00%	99.72%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.02%
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		SEKRETARIAT DAERAH															
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			719,196,956		137,078,440		207,051,366		127,813,206		234,606,788		706,549,800		98.24%
		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia (Dokumen)	5	471,067,116	-	99,966,920	-	147,470,016	-	56,685,226	-	161,914,938	-	466,037,100	0.00%	98.93%
		Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	3	396,002,000	2	91,363,640	-	116,194,300	-	48,720,226	1	138,875,018	3	395,153,184	100.00%	99.79%
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (Dokumen)	2	29,996,000	1	4,853,280	-	4,830,000	-	-	1	16,131,520	2	25,814,800	100.00%	86.06%
		Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	1	45,069,116	-	3,750,000	-	26,445,716	1	7,965,000	-	6,908,400	1	45,069,116	100.00%	100.00%
		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia (Dokumen)	7	221,625,840	-	33,361,520	-	49,482,050	-	65,254,230	-	69,129,650	-	217,227,450	0.00%	98.02%
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	3	101,625,840	1	22,338,600	-	26,463,590	-	10,708,750	2	38,455,650	3	97,966,590	100.00%	96.40%
		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Laporan)	2	120,000,000	1	11,022,920	1	23,018,460	-	54,545,480	-	30,674,000	2	119,260,860	100.00%	99.38%
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah (Dokumen)	3	26,504,000	-	3,750,000	-	10,099,300	-	5,873,750	-	3,562,200	-	23,285,250	0.00%	87.86%
		Fasilitasi Kerjasama antar	Jumlah Kerja Sama Antar	1	26,504		3,750		10,099,		5,873		3,562	1	23,2	100.00%	87.86%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemerintah	Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)		,000	-	,000	-	300	1	,750	-	,200		85,250		
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100.00%	98.24%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			12,401,731 ,203		82,020 ,000		2,057,130, 012		3,494,386 ,798		4,345,981 ,927		9,979,5 18,737		80.47%
		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama (Persen)	100	7,286,619 ,531	-	74,520 ,000	-	2,041,598, 284	-	3,461,419 ,026	-	1,664,408 ,882	-	7,241,9 46,192	0.00%	99.39%
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	149	4,216,999 ,707	-	61,020 ,000	147	272,542, 500	-	3,138,065 ,720	-	710,746 ,750	147	4,182,3 74,970	98.66%	99.18%
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4	3,069,619 ,824	-	13,500 ,000	3	1,769,055, 784	-	323,353 ,306	1	953,662 ,132	4	3,059,5 71,222	100.00%	99.67%
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar (Dokumen)	3	40,111 ,672	-	3,750 ,000	-	2,443, 750	-	10,414 ,022	-	22,403 ,513	-	39,0 11,285	0.00%	97.26%
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	40,111 ,672	-	3,750 ,000	-	2,443, 750	-	10,414 ,022	1	22,403 ,513	1	39,0 11,285	100.00%	97.26%
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Adanya Dokumen Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar (Dokumen)	1	5,075,000 ,000	-	3,750 ,000	-	13,087, 978	-	22,553 ,750	-	2,659,169 ,532	-	2,698,5 61,260	0.00%	53.17%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dokumen)	1	5,075,000 ,000	-	3,750 ,000	-	13,087, 978	-	22,553 ,750	1	2,659,169 ,532	1	2,698,5 61,260	100.00%	53.17%
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.54%	80.47%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
					14,073,1 75,360	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**									**11,628,960,9 71**	**99.60%**	**82.63%**
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Tinggi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Biro Hukum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			675,291,516		146,972,755		123,835,050		182,054,043		220,851,350		673,713,198		99.77%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	10.67	138,660,964	25	29,549,500	-	28,190,900	-	29,587,500	-	51,323,350	25	138,651,250	234.30%	99.99%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	31,255,880	1	4,814,850	-	7,418,000	-	7,400,000	1	11,617,300	2	31,250,150	100.00%	99.98%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	12,302,840	1	2,702,650	-	3,200,000	-	3,200,000	-	3,200,000	1	12,302,650	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2,412,160	-	-	-	-	-	-	1	2,411,600	1	2,411,600	100.00%	99.98%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2,414,120	1	-	-	2,413,350	-	-	-	-	1	2,413,350	100.00%	99.97%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	2,495,664	-	-	-	-	-	-	1	2,494,950	1	2,494,950	100.00%	99.97%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)														
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	85,254,540	-	20,890,350	-	15,159,550	-	18,987,500	2	30,216,100	2	85,253,500	100.00%	100.00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	2,525,760	1	1,141,650	-	-	-	-	3	1,383,400	4	2,525,050	100.00%	99.97%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	100	38,502,920	25	3,805,325	-	5,670,425	-	9,940,250	-	19,080,750	25	38,496,750	25.00%	99.98%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	2,247,720	-	-	-	-	-	2,246,950	1	-	1	2,246,950	100.00%	99.97%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	3,494,312	-	-	-	-	-	3,493,300	1	-	1	3,493,300	100.00%	99.97%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	3,082,120	-	300,000	-	765,100	-	-	1	2,016,250	1	3,081,350	100.00%	99.98%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	23,504,460	-	2,800,000	-	4,200,000	-	4,200,000	1	12,302,100	1	23,502,100	100.00%	99.99%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	2,882,120	-	-	-	-	-	-	1	2,881,350	1	2,881,350	100.00%	99.97%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	3	3,292,188	-	705,325	-	705,325	-	-	3	1,881,050	3	3,291,700	100.00%	99.99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)														
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	100	2,176,192	25	486,000	-	-	-	550,000	-	1,089,600	25	2,125,600	25.00%	97.68%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2,176,192	-	486,000	-	-	-	550,000	1	1,089,600	1	2,125,600	100.00%	97.68%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	30,590,812	25	4,482,200	-	6,000,000	-	9,550,000	-	10,547,650	25	30,579,850	25.00%	99.96%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	30,590,812	-	4,482,200	-	6,000,000	-	9,550,000	1	10,547,650	1	30,579,850	100.00%	99.96%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	314,821,388	30	95,101,230	-	60,900,325	-	72,987,293	-	85,243,100	30	314,231,948	30.00%	99.81%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	41,400,000	-	5,000,000	-	2,800,000	-	11,000,000	1	22,600,000	1	41,400,000	100.00%	100.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	7,570,000	-	800,000	-	-	-	2,809,300	2	3,461,700	2	7,071,000	100.00%	93.41%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	42,425,000	1	41,200,000	-	-	-	730,000	-	495,000	1	42,425,000	100.00%	100.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80	180,907,908	12	44,517,480	23	46,136,825	29	48,052,993	20	42,171,050	84	180,878,348	105.00%	99.98%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	42,518,480	-	3,583,750	-	11,963,500	-	10,395,000	1	16,515,350	1	42,457,600	100.00%	99.86%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	37,900,000	-	-	-	-	-	37,900,000	-	-	-	37,900,000	0.00%	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	37,900,000	-	-	-	-	10	37,900,000	-	-	10	37,900,000	100.00%	100.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	6,846,984	25	1,058,500	-	2,574,400	-	696,000	-	2,517,100	25	6,846,000	25.00%	99.99%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	6,846,984	-	1,058,500	-	2,574,400	-	696,000	1	2,517,100	1	6,846,000	100.00%	99.99%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	105,792,256	15	12,490,000	-	20,499,000	-	20,843,000	-	51,049,800	15	104,881,800	15.00%	99.14%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	74,240,000	2	12,135,000	4	17,066,000	2	12,575,000	3	31,797,000	11	73,573,000	100.00%	99.10%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	19,900,000	1	355,000	5	1,603,000	2	4,135,800	5	13,562,800	13	19,656,600	100.00%	98.78%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	7,100,000	-	-	2	-	-	2,050,000	3	5,050,000	5	7,100,000	100.00%	100.00%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	4,552,256	-	-	2	1,830,000	3	2,082,200	1	640,000	6	4,552,200	100.00%	100.00%
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	101.34%	99.77%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		SEKRETARIAT DAERAH															
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			724,911,844		165,633,570		112,253,840		157,652,985		285,467,284		721,007,679		99.46%
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan (Persen)	100	547,233,412	40	131,747,320	-	91,910,840	-	116,746,515	-	204,438,249	40	544,842,924	40.00%	99.56%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	35	216,825,235	7	56,045,970	7	34,346,990	6	59,988,465	4	65,569,739	24	215,951,164	68.57%	99.60%
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	470	103,195,152	173	21,227,550	105	17,943,800	131	11,714,500	150	51,502,450	559	102,388,300	118.94%	99.22%
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	540	58,274,565	193	6,481,900	138	11,864,350	151	1,518,750	169	37,728,010	651	57,593,010	120.56%	98.83%
		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	135	168,938,460	43	47,991,900	27	27,755,700	34	43,524,800	44	49,638,050	148	168,910,450	109.63%	99.98%
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum (Persen)	100	177,678,432	25	33,886,250	-	20,343,000	-	40,906,470	-	81,029,035	25	176,164,755	25.00%	99.15%
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2	114,233,808	1	20,679,000	-	13,837,350	1	30,093,070	-	48,759,250	2	113,368,670	100.00%	99.24%
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	2	63,444,624	-	13,207,250	-	6,505,650	1	10,813,400	1	32,269,785	2	62,796,085	100.00%	98.98%
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		97.19%	99.46%
															Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					1,400,203,360		**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**								**1,394,720,877**		**99.19%**	**99.61%**
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG			665,27		91,93		215,540,6		135,084,9		219,346,9		661,909,639		99.49%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2,860		7,051		77		70		41				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	11	111,969,237	2	18,143,712	5	31,953,280	7	27,636,240	11	33,900,000	11	111,633,232	100.00%	99.70%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	29,507,832	1	3,453,232	1	10,419,280	2	6,587,040	2	8,900,000	2	29,359,552	100.00%	99.50%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	82,461,405	1	14,690,480	1	21,534,000	2	21,049,200	2	25,000,000	2	82,273,680	100.00%	99.77%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	100	58,184,588	25	6,247,280	50	22,400,000	75	16,800,000	100	12,737,280	100	58,184,560	100.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	58,184,588	1	6,247,280	1	22,400,000	2	16,800,000	3	12,737,280	3	58,184,560	100.00%	100.00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	100	2,706,977	25	-	50	755,040	75	217,200	100	1,734,640	100	2,706,880	100.00%	100.00%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2,706,977	-	-	-	755,040	1	217,200	1	1,734,640	1	2,706,880	100.00%	100.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	45,386,782	25	2,574,320	50	4,163,040	75	18,250,000	100	18,265,200	100	43,252,560	100.00%	95.30%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30	17,464,320	10	81 4,320	20	-	25	16,650,000	30	-	30	17,464,320	100.00%	100.00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	27,922,462	-	1,760,000	-	4,163,040	2	1,600,000	2	18,265,200	2	25,788,240	100.00%	92.36%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	292,897,955	25	35,251,198	50	126,094,677	75	58,048,241	100	72,992,429	100	292,386,545	100.00%	99.83%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	34,357,963	-	-	-	31,925,060	1	-	1	2,359,440	1	34,284,500	100.00%	99.79%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	28,600,000	-	4,915,000	-	4,245,000	1	8,718,000	1	10,711,000	1	28,589,000	100.00%	99.96%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7,155,072	-	908,800	-	1,000,000	1	430,560	1	4,751,360	1	7,090,720	100.00%	99.10%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	12,854,485	-	369,000	-	2,052,902	-	819,256	1	9,569,429	1	12,810,587	100.00%	99.66%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	149,330,901	10	28,302,318	20	35,643,715	25	47,380,425	30	37,914,320	30	149,240,778	100.00%	99.94%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	60,599,534	-	756,080	-	51,228,000	1	700,000	1	7,686,880	1	60,370,960	100.00%	99.62%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	43,704,181	25	358,800	50	-	75	-	100	43,200,090	100	43,558,890	100.00%	99.67%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	43,704,181	-	358,800	-	-	-	-	1	43,200,090	1	43,558,890	100.00%	99.67%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	2,475,112	25	-	50	287,040	75	1,033,289	100	1,118,122	100	2,438,451	100.00%	98.52%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2,475,112	-	-	-	287,040	1	1,033,289	1	1,118,122	1	2,438,451	100.00%	98.52%
		Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pengelolaan	100	107,94		29,36		29,887,6		13,100,0		35,399,1		107,748,521	100.00%	99.82%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		8,028	25	1,741	50	00	75	00	100	80	100			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	100,951,814	3	28,211,741	7	28,637,600	10	12,050,000	12	32,002,140	12	100,901,481	100.00%	99.95%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	6,996,214	1	1,150,000	2	1,250,000	3	1,050,000	4	3,397,040	4	6,847,040	100.00%	97.87%
						Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.49%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		SEKRETARIAT DAERAH															
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			385,000,000		42,861,822		105,725,131		77,987,145		155,544,720		382,118,818		99.25%
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan (Persen)	90	155,000,000	20	24,263,695	40	45,852,375	60	34,493,371	90	49,789,699	90	154,399,140	100.00%	99.61%
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	3	125,000,000	1	22,678,935	2	32,317,458	2	28,493,371	3	41,159,699	3	124,649,463	100.00%	99.72%
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Dokumen)	2	30,000,000	1	1,584,760	1	13,534,917	2	6,000,000	2	8,630,000	2	29,749,677	100.00%	99.17%
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Pengelolaan Kebijakan SDA (Persen)	100	50,000,000	25	828,099	50	12,770,000	75	3,233,471	100	32,399,396	100	49,230,966	100.00%	98.46%
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Persen)	100		25		50		75		100		100		100.00%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (Dokumen)	2	50,000,000	1	828,099	1	12,770,000	1	3,233,471	2	32,399,396	2	49,230,966	100.00%	98.46%
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD (Persen)	100	180,000,000	25	17,770,028	50	47,102,756	75	40,260,303	100	73,355,625	100	178,488,712	100.00%	99.16%
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	2	42,000,000	1	4,780,600	1	9,798,796	2	7,254,124	2	19,822,830	2	41,656,350	100.00%	99.18%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)													
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Dokumen)	2	38,859,010	1	2,989,428	1	9,330,000	2	12,241,179	2	13,588,441	2	38,149,048	100.00%	98.17%
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Dokumen)	2	99,140,990	1	10,000,000	1	27,973,960	2	20,765,000	2	39,944,354	2	98,683,314	100.00%	99.54%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.25%
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			149,172,500		37,003,288		22,801,732		24,792,488		63,886,236		148,483,744		99.54%
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pemb. Daerah (Persen)	100	94,172,500	25	34,503,288	50	16,680,000	75	14,660,452	100	27,888,120	100	93,731,860	100.00%	99.53%
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Laporan)	2	46,000,000	1	20,503,828	1	8,340,000	2	6,038,452	2	10,813,200	2	45,695,480	100.00%	99.34%
		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (Laporan)	2	48,172,500	1	13,999,460	1	8,340,000	2	8,622,000	2	17,074,920	2	48,036,380	100.00%	99.72%
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (Persen)	100	55,000,000	25	2,500,000	50	6,121,732	75	10,132,036	100	35,998,116	100	54,751,884	100.00%	99.55%
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	8	55,000,000	2	2,500,000	4	6,121,732	6	10,132,036	8	35,998,116	8	54,751,884	100.00%	99.55%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	99.54%
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					1,199,	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH**								**1,192,512,201**		**100%**	**99.42%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				445,360	PROGRAM				
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Unit Kerja: Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			499,170,610		42,378,143		131,141,207		121,840,410		197,001,732		492,361,492		98.64%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin 11,03 Poin 21,17 Poin 24,47 Poin)	10.67	99,002,500	-	13,187,500	-	20,452,500	-	24,307,500	-	40,212,000	-	98,159,500	0.00%	99.15%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	31,382,500	-	4,475,000	-	7,500,000	-	7,890,000	-	11,480,000	-	31,345,000	0.00%	99.88%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	2,020,000	-	1,000,000	-	1,020,000	-	-	-	-	-	2,020,000	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2,020,000	-	-	-	-	-	480,000	-	1,540,000	-	2,020,000	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1	2,020,000	-	1,000,000	-	1,020,000	-	-	-	-	-	2,020,000	0.00%	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)														
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2,020,000	-	-	-	-	-	-	-	2,020,000	-	2,020,000	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	16,845,000	-	2,237,500	-	3,412,500	-	3,637,500	-	7,520,000	-	16,807,500	0.00%	99.78%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	42,695,000	-	4,475,000	-	7,500,000	-	12,300,000	-	17,652,000	-	41,927,000	0.00%	98.20%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD (Persen 97 Persen)	100	4,137,200	-	-	-	380,000	-	480,000	-	3,277,200	-	4,137,200	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2,117,200	-	-	-	-	-	-	-	2,117,200	-	2,117,200	0.00%	100.00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2,020,000	-	-	-	380,000	-	480,000	-	1,160,000	-	2,020,000	0.00%	100.00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	279,360,910	-	20,475,000	-	86,434,300	-	62,099,045	-	109,245,880	-	278,254,225	0.00%	99.60%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	70,800,000	-	15,955,000	-	19,555,000	-	18,310,000	-	16,980,000	-	70,800,000	0.00%	100.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10,698,400	-	1,100,000	-	3,360,000	-	3,018,000	-	3,220,400	-	10,698,400	0.00%	100.00%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30	70,786,145	-	-	-	61,209,300	-	-	-	9,061,000	-	70,270,300	0.00%	99.27%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	127,076,365	-	3,420,000	-	2,310,000	-	40,771,045	-	79,984,480	-	126,485,525	0.00%	99.54%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	3,020,000	-	-	-	500,000	-	980,000	-	1,540,000	-	3,020,000	0.00%	100.00%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	3,020,000	-	-	-	500,000	-	980,000	-	1,540,000	-	3,020,000	0.00%	100.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	113,650,000	-	8,715,643	-	23,374,407	-	33,973,865	-	42,726,652	-	108,790,567	0.00%	95.72%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	57,320,000	-	7,840,643	-	12,159,357	-	12,008,865	-	21,743,000	-	53,751,865	0.00%	93.78%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	56,330,000	-	875,000	-	11,215,050	-	21,965,000	-	20,983,652	-	55,038,702	0.00%	97.71%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0.00%	98.64%
														Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		SEKRETARIAT DAERAH														
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1,017,570,750		88,832,671		281,642,323		309,272,622		325,182,978		1,004,930,594		98.76%
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur (Persen)	100	297,681,000	-	42,823,921	-	64,797,500	-	60,291,862	-	126,824,318	-	294,737,601	0.00%	99.01%
		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	2	115,692,000	-	15,395,171	-	20,821,250	-	17,517,500	-	60,719,318	-	114,453,239	0.00%	98.93%
		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	124,046,250	-	19,362,500	-	30,393,750	-	30,450,000	-	43,840,000	-	124,046,250	0.00%	100.00%
		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	57,942,750	-	8,066,250	-	13,582,500	-	12,324,362	-	22,265,000	-	56,238,112	0.00%	97.06%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik (Persen)	100	500,662,000	-	24,625,000	-	156,069,500	-	191,739,510	-	124,732,250	-	497,166,260	0.00%	99.30%
		Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4	130,387,000	-	9,797,500	-	29,433,250	-	25,126,250	-	65,601,000	-	129,958,000	0.00%	99.67%
		Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	317,231,250	-	6,375,000	-	114,242,500	-	153,132,010	-	40,471,250	-	314,220,760	0.00%	99.05%
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4	53,043,750	-	8,452,500	-	12,393,750	-	13,481,250	-	18,660,000	-	52,987,500	0.00%	99.89%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Persen)	100	219,227,750	-	21,383,750	-	60,775,323	-	57,241,250	-	73,626,410	-	213,026,733	0.00%	97.17%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	15	77,249,000	-	6,000,000	-	22,211,830	-	16,925,000	-	31,166,410	-	76,303,240	0.00%	98.78%
		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	3	72,524,750	-	8,671,250	-	19,277,243	-	23,346,250	-	21,200,000	-	72,494,743	0.00%	99.96%
		Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	69,454,000	-	6,712,500	-	19,286,250	-	16,970,000	-	21,260,000	-	64,228,750	0.00%	92.48%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	98.76%
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Tinggi
					1,516,741,360	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**								**1,497,292,086**		**0.00%**	**98.72%**
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Biro Organisasi

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
					I		II			III	IV						
1	2	3	4	7	8		9			10	11		12			13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			774,944,066		91,049,687		204,070,448		236,222,114		235,658,267		767,000,516		98.97%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	14.7	338,252,361	-	46,431,250	-	96,332,962	-	99,994,508	-	95,467,500	-	338,226,220	0.00%	99.99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	24		-		-		-		-		-		0.00%	
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	18		-		-		-		-		-		0.00%	
			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	28		-		-		-		-		-		0.00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	90,358,835	-	11,837,500	-	27,859,682	-	25,623,606	2	25,025,000	2	90,345,788	100.00%	99.99%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	173,906,926	-	22,625,000	-	49,157,520	-	54,728,676	2	47,392,500	2	173,903,696	100.00%	100.00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	73,986,600	1	11,968,750	-	19,315,760	-	19,642,226	3	23,050,000	4	73,976,736	100.00%	99.99%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	17,476,800	-	-	-	-	-	-	-	15,861,800	-	15,861,800	0.00%	90.76%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	15,776,800	-	-	-	-	2	-	-	15,761,800	2	15,761,800	100.00%	99.90%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	1,700,000	-	-	2	-	6	-	-	100,000	8	100,000	66.67%	5.88%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	305,735,737	-	35,168,437	-	75,951,453	-	92,875,446	-	97,845,007	-	301,840,343	0.00%	98.73%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			(Paket)														
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10,000,000	2	1,760,600	2	-	2	6,375,100	4	1,855,100	10	9,990,800	100.00%	99.91%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	300	35,050,000	40	4,841,500	60	6,675,000	50	10,495,500	70	13,036,000	220	35,048,000	73.33%	99.99%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	80	10,400,000	20	2,600,000	20	1,000,000	30	4,200,000	10	2,600,000	80	10,400,000	100.00%	100.00%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60	63,325,583	10	11,821,468	20	15,236,863	20	16,565,062	10	16,148,604	60	59,771,997	100.00%	94.39%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	70	145,666,520	10	12,608,309	10	49,129,500	20	48,824,220	10	35,008,563	50	145,570,592	71.43%	99.93%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	10	5,081,474	-	-	-	1,671,050	10	3,404,544	-	-	10	5,075,594	100.00%	99.88%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	36,212,160	-	1,536,560	-	2,239,040	-	3,011,020	1	29,196,740	1	35,983,360	100.00%	99.37%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		-		-		-		-		0.00%
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	55,179,168	-	9,450,000	-	16,828,332	-	16,200,970	-	12,558,420	-	55,037,722	0.00%	99.74%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	55,179,168	-	9,450,000	-	16,828,332	2	16,200,970	-	12,558,420	2	55,037,722	100.00%	99.74%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	58,300,000	-	-	-	14,957,701	-	27,151,190	-	13,925,540	-	56,034,431	0.00%	96.11%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Pemerintahan Daerah (Persen)														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	58,300,000	-	-	9	14,957,701	3	27,151,190	-	13,925,540	12	56,034,431	92.31%	96.11%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	92.77%	98.97%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		SEKRETARIAT DAERAH															
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			515,931,294		48,064,667		184,379,323		180,972,726		98,840,165		512,256,881		99.29%
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Indeks Kematangan Organisasi (Poin)	46	217,670,778	-	20,961,422	-	94,232,920	-	91,752,498	-	10,659,000	-	217,605,840	0.00%	99.97%
			Persentase Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dan nomenklatur perangkat Daerah dengan aturan yang ada (Persen)	85		-		-		-		-		-		0.00%	
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	114,939,843	-	6,703,506	-	67,187,060	-	37,696,755	1	3,339,000	1	114,926,321	100.00%	99.99%
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota (Dokumen)	6	49,982,155	1	1,675,000	-	8,112,860	3	32,830,923	2	7,320,000	6	49,938,783	100.00%	99.91%
		Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	3	52,748,780	1	12,582,916	-	18,933,000	2	21,224,820	-	-	3	52,740,736	100.00%	99.98%
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Pemprov. (Poin)	74	298,260,516	-	27,103,245	-	90,146,403	-	89,220,228	-	88,181,165	-	294,651,041	0.00%	98.79%
			Persentase OPD yang telah menyusun	65		-		-		-		-		-		0.00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Proses Bisnis sesuai aturan yang ada (Persen)													
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi (Dokumen)	2	59,628,795	-	-	-	37,965,796	2	9,833,508	-	11,676,880	2	59,476,184	100.00%	99.74%
		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja (Dokumen)	7	51,805,163	2	15,037,186	-	22,220,000	3	10,171,000	2	4,370,000	7	51,798,186	100.00%	99.99%
		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja (Laporan)	1	50,264,298	-	5,729,000	-	7,120,607	-	25,914,000	1	11,199,060	1	49,962,667	100.00%	99.40%
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan (Dokumen)	30	53,266,453	5	4,444,987	10	11,130,000	15	10,371,040	11	26,658,800	41	52,604,827	136.67%	98.76%
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik (Dokumen)	3	83,295,807	-	1,892,072	-	11,710,000	3	32,930,680	-	34,276,425	3	80,809,177	100.00%	97.01%
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		103.79%	99.29%
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				1,290,875,360	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**								**1,279,257,397**			**97.17%**	**99.10%**
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

Unit Kerja : Sekretariat Daerah Biro Umum

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang															
		PROGRAM PENUNJANG			119,607,331,85		17,839,041,243		26,444,240,164		30,794,019,199		43,823,925,9		118,901,226,		99.41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8								56		562		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	25	822,825,101	-	131,054,155	-	188,643,624	-	209,596,722	24	288,288,090	24	817,582,591	96.00%	99.36%
			Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	13		-		-		-		13		13		100.00%	
			Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	27		-		-		-		27		27		100.00%	
			Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	17		-		-		-		17		17		97.06%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	271,378,769	5	47,330,450	1	69,885,760	1	46,394,027	-	107,148,511	7	270,758,748	100.00%	99.77%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	58,006,503	1	27,371,932	-	1,708,127	-	11,460,372	-	17,442,931	1	57,983,362	100.00%	99.96%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	59,180,042	1	-	-	13,645,856	-	25,693,016	-	19,823,335	1	59,162,207	100.00%	99.97%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	21,273,616	1	12,462,287	-	-	-	-	-	8,790,258	1	21,252,545	100.00%	99.90%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	37,733,235	-	-	-	14,220,885	-	-	1	23,334,108	1	37,554,993	100.00%	99.53%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2	40,073,461	2	8,375,581	-	9,169,331	-	5,810,052	-	16,680,586	2	40,035,550	100.00%	99.91%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	335,179,475	3	35,513,905	2	80,013,665	1	120,239,255	1	95,068,361	7	330,835,186	100.00%	98.70%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	100	31,894,287,818	17	5,793,125,861	26	10,982,048,360	65	6,985,289,536	99	7,828,930,617	99	31,589,394,374	99.41%	99.04%
			Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD (Persen)	100		33		32		75		99		239		238.92%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	3420	29,905,804,365	900	5,387,736,656	900	10,547,702,451	910	6,500,029,239	710	7,172,308,416	3,420	29,607,776,762	100.00%	99.00%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	220,038,017	3	35,631,150	-	62,834,964	-	54,024,955	-	63,534,230	3	216,025,299	100.00%	98.18%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	11000	1,198,478,369	2,500	254,651,956	2,500	274,790,854	2,350	353,535,010	2,700	314,537,155	10,050	1,197,514,975	91.36%	99.92%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	337,613,019	1	54,100,750	-	59,176,480	-	49,126,820	-	173,801,460	1	336,205,510	100.00%	99.58%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	46,513,768	2	7,579,920	-	4,052,100	-	5,159,000	-	29,681,000	2	46,472,020	100.00%	99.91%
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	5	133,282,390	2	42,740,911	1	23,470,183	2	15,287,512	-	51,736,856	5	133,235,462	100.00%	99.96%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	16	52,557,890	4	10,684,518	4	10,021,328	4	8,127,000	4	23,331,500	16	52,164,346	100.00%	99.25%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	100	6,127,851,034	21	794,933,948	27	1,058,587,667	77	1,295,981,019	100	2,957,168,312	100	6,106,670,946	100.00%	99.65%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30	468,528,363	20	104,313,250	10	111,945,512	-	79,966,900	-	171,939,024	30	468,164,686	100.00%	99.92%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	2,626,242,661	1	354,151,450	1	496,243,000	1	740,168,375	1	1,017,799,950	4	2,608,362,775	100.00%	99.32%
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4	181,552,384	1	43,441,480	1	13,715,000	1	28,370,280	1	95,722,000	4	181,248,760	100.00%	99.83%
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2,329,132,818	2	218,574,988	1	367,132,375	1	268,712,350	2	1,473,147,850	6	2,327,567,563	100.00%	99.93%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	72	93,491,211	20	19,180,000	30	15,313,000	10	21,602,000	12	37,317,328	72	93,412,328	100.00%	99.92%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	428,903,597	1	55,272,780	1	54,238,780	-	157,161,114	-	161,242,160	2	427,914,834	100.00%	99.77%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-		-		-	0.00%
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Persen)	100	97,040,843	23	13,419,005	25	37,427,137	59	15,226,050	100	30,243,611	207	96,315,803	206.50%	99.25%
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	97,040,843	1	13,419,005	-	37,427,137	1	15,226,050	-	30,243,611	2	96,315,803	100.00%	99.25%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	100	1,461,695,147	18	257,059,836	24	170,681,290	65	307,661,528	100	713,566,982	100	1,448,969,636	100.00%	99.13%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7	385,147,823	-	-	-	-	-	-	7	375,733,100	7	375,733,100	100.00%	97.56%
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10	161,601,162	4	21,489,833	2	61,921,881	2	52,126,238	2	25,883,806	10	161,421,758	100.00%	99.89%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	210,881,767	1	46,280,514	-	57,073,632	-	35,756,558	-	71,376,545	1	210,487,249	100.00%	99.81%
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	7	165,382,977	3	12,999,489	2	45,809,975	1	19,648,079	1	85,662,271	7	164,119,814	100.00%	99.24%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	38,565,418	-	-	1	1,295,802	-	36,693,605	1	487,500	2	38,476,907	100.00%	99.77%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	120	500,116,000	55	176,290,000	45	4,580,000	11	163,437,048	8	154,423,760	119	498,730,808	99.17%	99.72%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD (Persen)	100	11,910,280,014	18	1,667,525,210	28	2,306,995,266	55	3,889,762,907	100	4,040,332,828	100	11,904,616,211	100.00%	99.95%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1,535,533,767	4	454,560,670	-	344,452,070	-	198,961,380	-	537,517,290	4	1,535,491,410	100.00%	100.00%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	656,143,526	4	181,023,801	-	141,650,401	-	98,246,027	-	234,779,600	4	655,699,829	100.00%	99.93%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4,285,276,179	2	423,718,520	-	415,863,880	-	2,674,775,320	-	770,891,810	2	4,285,249,530	100.00%	100.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	517,165,302	1	-	1	64,790,380	-	192,887,441	-	259,460,280	2	517,138,101	100.00%	99.99%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	3,653,059,884	3	535,253,874	3	1,227,762,247	3	353,787,935	3	1,536,123,608	12	3,652,927,664	100.00%	100.00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	1,064,357,435	3	62,337,093	3	88,331,074	3	353,004,401	3	560,205,532	12	1,063,878,100	100.00%	99.95%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	148,193,629	1	10,631,252	-	24,145,214	-	18,100,403	-	91,985,018	1	144,861,887	100.00%	97.75%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	50,550,292	-	-	-	-	-	-	1	49,369,690	1	49,369,690	100.00%	97.66%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	13,430,328,543	-	-	11	158,000,000	45	5,549,807,805	100	7,591,214,681	156	13,299,022,486	156.00%	99.02%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)													
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		-		-		-		-	0.00%
		Pengadaan Mebel			-		-		-		-		-		-	0.00%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	600,776,000	-	-	-	-	-	-	3	600,349,236	3	600,349,236	100.00%	99.93%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	70	12,829,552,543	-	-	15	158,000,000	30	5,549,807,805	25	6,990,865,445	70	12,698,673,250	100.00%	98.98%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	6,997,192,012	26	1,639,102,000	35	1,599,256,012	72	1,330,001,116	100	2,361,069,734	100	6,929,428,862	100.00%	99.03%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	390,108,606	3	100,170,107	3	67,256,061	3	96,819,174	3	124,403,983	12	388,649,325	100.00%	99.63%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3,357,258,406	3	788,437,843	3	792,758,441	3	853,313,192	3	881,707,061	12	3,316,216,537	100.00%	98.78%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	3,249,825,000	1	750,494,050	-	739,241,510	-	379,868,750	-	1,354,958,690	1	3,224,563,000	100.00%	99.22%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	9,710,321,826	25	2,148,175,928	32	1,347,230,681	60	2,488,716,857	100	3,662,071,866	100	9,646,195,332	100.00%	99.34%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	20	1,013,923,311	5	184,861,721	10	283,485,204	2	157,548,946	3	387,889,479	20	1,013,785,350	100.00%	99.99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120	3,782,442,038	34	690,603,457	25	451,824,990	46	1,242,459,801	15	1,336,628,687	120	3,721,516,935	100.00%	98.39%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	170	1,505,510,557	35	416,659,750	44	230,460,987	63	306,031,350	28	549,299,400	170	1,502,451,487	100.00%	99.80%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	3,408,445,920	3	856,051,000	3	381,459,500	3	782,676,760	3	1,388,254,300	12	3,408,441,560	100.00%	100.00%
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100	1,806,767,493	17	282,791,825	27	445,386,528	75	340,068,606	100	698,145,295	100	1,766,392,254	100.00%	97.77%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	556,767,493	2	73,438,998	-	132,030,266	-	131,785,978	-	179,180,111	2	516,435,353	100.00%	92.76%
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			-		-		-		-		-		-		0.00%
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	1,250,000,000	2	209,352,827	-	313,356,262	-	208,282,628	-	518,965,184	2	1,249,956,901	100.00%	100.00%
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah (Persen)	100	17,568,149,097	25	3,510,021,589	45	4,228,603,668	70	4,297,890,980	100	5,525,742,617	100	17,562,258,854	100.00%	99.97%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	6,183,125,100	3	1,665,498,431	2	1,742,951,462	-	1,581,821,643	-	1,191,290,899	5	6,181,562,435	100.00%	99.97%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			-		-		-		-		-		-		0.00%
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	10	11,385,023,997	5	1,844,523,158	3	2,485,652,206	1	2,716,069,337	1	4,334,451,718	10	11,380,696,419	100.00%	99.96%
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100	12,208,872,812	14	1,204,131,072	23	1,951,716,503	60	2,743,255,333	100	6,280,358,318	100	12,179,461,226	100.00%	99.76%
		Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	210	174,893,642	40	10,225,200	75	26,567,815	55	57,383,907	20	78,196,736	190	172,373,658	90.48%	98.56%
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	750	11,310,071,177	195	1,167,618,421	242	1,834,665,587	175	2,584,445,550	128	5,705,214,883	740	11,291,944,441	98.67%	99.84%
		Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	1000	723,907,993	400	26,287,451	250	90,483,101	202	101,425,876	140	496,946,699	992	715,143,127	99.20%	98.79%
		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan (Persen)	100	5,571,720,118	22	397,700,814	29	1,969,663,428	50	1,340,760,740	100	1,846,793,005	100	5,554,917,987	100.00%	99.70%
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Laporan)	800	1,980,658,583	200	122,922,155	94	361,073,039	125	292,741,108	350	1,196,863,351	769	1,973,599,653	96.13%	99.64%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	12	2,189,257,158	3	83,280,564	3	1,299,286,683	3	759,415,939	3	46,429,014	12	2,188,412,200	100.00%	99.96%
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	800	1,401,804,377	200	191,498,095	294	309,303,706	125	288,603,693	136	603,500,640	755	1,392,906,134	94.38%	99.37%
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99.64%	99.41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					119,607,331,858	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	118,901,226,562	99.64%	99.41%
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

a. Tantangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.
2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat			100	100	100	100	96.22	99.78	100	100	

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Hukum

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Tingkat Reformasi Hukum			70	80	90	95	77.03	97.04	97.50	97.75	

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Tingkat Kualitas Kebijakan			60	70	80	90	-	-	80	90	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Tingkat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			73,03	75,95	79,75	75,95	89,91	77,78	79,75	79,75	

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Organisasi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Indeks Kelembagaan			N/A	65	67	70	N/A	65.03	67	70	

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Biro Umum

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Layanan			N/A	100	100	100	N/A	100	100	100	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai unsur pendukung yang memilki peran penting dibawah kepemimpinan sekretaris daerah yang dilimpahkan pada biro-biro. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaran pemerintahan Sekretariat Daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu kedepan.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:
   1. Belum Optimalnya fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota.

      Dalam upaya fisilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintah, koordinasi menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi. Kemampuan SDM dalam melakukan diplomasi menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. Sebab dalam upaya fasilitasi ini, benturan kepentingan seringkali tidak dapat terhindarkan sehingga upaya untuk menemukan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak harus bisa terwujud.

      Upaya fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi melibatkan koordinasi yang intensif dengan pihak Kementrian Dalam Negeri serta masingmasing kabupaten/kota serta kecamatan yang berbatasan baik dalam lingkup batas antarprovinsi maupun batas daerah di dalam wilayah Sulawesi Barat.

      Kemunculan klaim atas wilayah Sulawesi Barat harus terus diantisipasi dengan kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun kelengkapan data dan dokumen yang bisa menjadi kekuatan hukum dalam mengklaim wilayah khususnya wilayah terluar Sulawesi Barat.

      Penegasan batas wilayah didaerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat diantaranya batas dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dan batas dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 P/HUM/2023 atas Permendagri 60 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

      Inventarisasi data lapangan dan dokumen terkait batas daerah mutlak diperlukan serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk merumuskan kesepakatan batas daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Belum optimalnya fasilitasi kerjasama daerah.

Peran fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi salah satu peran penting yang banyak mendukung dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Barat. Namun peran fasilitasi ini seringkali tidak dapat berjalan dengan maksimal akibat kurangnya perhatian instansi terkait atas kebutuhan data serta kelengkapan laporan tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.

Secara hukum daya ikat untuk meminta instansi yang telah difasilitasi kerjasamanya untuk melaporkan tindaklanjut kerjasama masih lemah. Meskipun telah terbit Permendagri 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Permendagri 25 tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri, namun belum ada perda yang secara khusus mengikat di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat.

Padahal laporan atas tindak lanjut fasilitasi kerjasama ini menjadi hal yang dinilai oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dukungan untuk mengoptimalkan fasilitasi kerjasama daerah ini perlu untuk dikuatkan

3. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (ELPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas amanat yang diterima melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Penyusunan LPPD sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang Undang 23 tahun 2014 menjadi laporan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan desentralisasi/ urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah. Sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan dokumen penting yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disetiap tahunnya. Peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Barat serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di tingkat Kabupaten se Sulawesi Barat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), upaya koordinasi untuk memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring bisa berjalan dengan baik. Selain itu komitmen pimpinan dalam hal ini, Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah adalah hal yang sangat dominan untuk memudahkan upaya koordinasi dan memastikan proses pembinaan, evaluasi dan monitoring berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Dalam proses ini, pemahaman aparatur baik di internal selaku pendukung dalam proses pembinaan dan monitoring maupun pemahaman aparatur di masing-masing perangkat daerah yang sangat penting untuk diperhatikan sebab ketersediaan dan pemahaman atas data yang dibutuhkan dalam menyusun LPPD ini berpengaruh secara langsung dalam upaya peningkatan poin LPPD atas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

4. Belum Optimalnya Fasilitasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru

   Pembentukan daerah otonomi baru menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya sebab aspirasi masyarakat terkait pembentukan daerah otonomi baru terus disuarakan. Namun upaya fasilitasi ini belum dapat dilakukan dengan maksimal sebab moratorium pemekaran daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 masih belum dicabut.

   Di sisi lain fasilitasi pembentukan daerah otonomi baru tetap harus dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen terkait pembentukan daerah otonomi baru yang urgent untuk segera ditindaklanjuti sudah siap saat moratorium dicabut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan kota Mamaju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Maka upaya antisipasi atas pencabutan moratorium harus terus dilakukan dengan memastikan kelengkapan data dan ketersediaan data serta dokumen yang dibutuhkan selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menyukseskan upaya pembentukan Kota Mamuju.

5. Belum optimalnya fasilitasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan DPRD

   Isu strategis terkait fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD harus menjadi salah satu isu utama pada 2025-2029 sebab Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan berdampak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan berpengaruh pula pada akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah dimana jarak antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi berjarak minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun sehingga proses fasilitasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan proses pemilihan hingga pengambilan sumpah jabatan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini termasuk pula seluruh kelengkapan administrasi yang disyaratkan untuk penetapan pejabat yang ditunjuk. Untuk mengantisipasi hal ini, maka segala sumber daya yang dibutuhkan harus sudah siap saat pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Belum optimalnya implementasi peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Gubernur selaku pimpinan di lingkup pemerintah Provinsi telah diamanatkan untuk melaksanakan sejumlah peran yang sebelumnya dilaksanakan penuh oleh pemerintah pusat. Gubernur mengemban 46 jenis tugas dan wewenang dalam perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dari sejumlah peran tersebut, setiap tahunnya ada penguatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendorong efektivitas pelaksanaan peran tersebut. Namun dalam prosesnya masih terdapat sejumlah tantangan yang membuat peran ini masih belum bisa diterapkan dengan optimal. Sejumlah wewenang yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke Gubernur masih belum dipahami oleh pemerintah kabupaten dan instansi vertikal.

7. Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan.

Fasilitasi dan pembinaan kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam membangun harmoni sosial, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga keagamaan, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap program-program yang telah dijalankan. Kondisi ini menyebabkan dampak dari kegiatan keagamaan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pembinaan keagamaan juga menjadi tantangan tersendiri. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansi keagamaan serta penguatan kapasitas kelembagaan umat. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas program-program yang bertujuan untuk mendorong moderasi beragama dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Untuk itu, diperlukan strategi penguatan peran Bagian Kesra dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan secara lebih terencana, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sinergi dengan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan perangkat daerah lain perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem pembinaan keagamaan yang lebih inklusif dan berdampak nyata.

Salah satu kendala yang cukup terasa di lapangan adalah keterbatasan sumber daya serta lokasi rumah ibadah yang menerima bantuan tersebut. Sejumlah rumah ibadah yang terletak di pelosok belum memiliki akses media komunikasi dan transportasi yang terbatas. Hambatan eksternal ini berbenturan langsung dengan hambatan internal terkait terbatasnya sumber daya baik transportasi maupun komunikasi yang mendukung mobilitas tim evaluasi dan monitoring di lapangan.

Pelaksanaan MTQ dan STQH perlu menjadi perhatian penting karena berpengaruh langsung pada pandangan publik pada Pemerintah Sulawesi Barat. Keikutsertaan pada ajang MTQ dan STQH saja tidak akan bisa menaikkan citra positif masyarakat atas kemampuan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan di bidang Keagamaan. Upaya untuk meraih posisi pemenang di kompetisi tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

juga perlu menjadi perhatian yang berarti upaya koordinasi dan pembinaan di tingkat kabupaten dan provinsi perlu direncanakan dan dilakukan dengan baik

8. Belum optimalnya koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

   Koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, baik yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, maupun non pelayanan dasar seperti pemberdayaan sosial dan keagamaan, masih belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari tumpang tindih program antar perangkat daerah, kurang sinkronnya data dan perencanaan, serta lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu. Akibatnya, pelaksanaan program sering tidak tepat sasaran dan berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan publik di sektor kesejahteraan.

   Minimnya forum koordinasi lintas sektor dan lemahnya integrasi antar kebijakan menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Beberapa inisiatif strategis dari perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat, sehingga potensi duplikasi anggaran dan inefisiensi sumber daya menjadi isu yang berulang. Hal ini juga memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

   Oleh karena itu, perlu penguatan peran koordinator pada level Bagian Kesra untuk mendorong harmonisasi kebijakan, memperkuat komunikasi antar stakeholder, serta memastikan bahwa seluruh program kesejahteraan rakyat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Pendekatan berbasis data dan evaluasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan berkelanjutan.

   Pemahaman atas peran pemerintah provinsi khususnya Sekretariat Daerah dalam fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar masih rendah. Hal ini menghambat proses koordinasi dalam upaya fasilitasi yang dilakukan.

   Di sisi lain, peran Sekretariat Daerah yang melekat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terkait non pelayanan dasar di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, trasnmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan masih belum sepenuhnya dipahami oleh instansi teknis serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pelibatan secara aktif oleh instansi teknis dalam upaya perumusan kebijakan di bidang tersebut pelu dilakukan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum

   Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

   1. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.

      Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

satu penyebab utamanya adalah belum terbangunnya sinergi yang kuat antar instansi pemerintah. Komunikasi dan koordinasi yang lemah sering kali mengakibatkan ketidakharmonisan dalam merumuskan dan menyelaraskan kebijakan hukum yang akan diterbitkan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang perancangan peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penting. Daerah atau unit kerja yang belum memiliki tenaga perancang peraturan, sehingga penyusunan regulasi tidak didasarkan pada standar kualitas yang memadai, serta kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap para perancang. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam mendukung kegiatan koordinasi, harmonisasi, serta pembahasan lintas sektor.

2. Belum optimalnya fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota.

Pembinaan produk hukum daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan rancangan peraturan kabupaten oleh Gubernur, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi peraturan perundang-undangan sangat urgen. Disatu sisi produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah provinsi difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, namun disisi yang lain pemerintah provinsi juga melakukan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi provinsi terhadap kabupaten dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi menjadi tantangan tersendiri yang menyebabkan upaya pembenahan regulasi terkesan lambat.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang ditujukan kepada kepala daerah, perangkat daerah, dan lembaga pemerintahan di bawahnya yang timbul dari pihak swasta, masyarakat maupun perorangan. Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, namun dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, diperlukan pananganan dan penyelesaian secara komprehensif untuk penyelesaian sengketa di badan peradilan.

Dalam rangka penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sebagai standarisasi metode penyelesaian permasalahan litigasi dan non litigasi, sementara itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Proinsi Sulawesi Barat, bahwa dalam penanganan perkara pemerintah daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Belum Optimalnya Fasilitasi Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Sistem Informasi Pembinaan Perekonomian Belum Optimal

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Peningkatan fasilitasi kebijakan perekonomian tidak hanya terfokus pada pengendalian inflasi, juga diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Daerah melalui fasilitasi Akses Keuangan Daerah yang dapat menjembatani masyarakat pengusaha mendapatkan dukungan keuangan dari Lembaga-lembaga jasa keuangan dalam menjalankan usahanya. Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin untuk menetapkan dan mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal kebijakan ekonomi, implementasinya diwujudkan dalam pembuatan regulasi dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Memasuki era baru sistem pemerintah di Indonesia terutama sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah sudah lebih leluasa dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk mengembangkan potensi daerah, khususnya dalam bidang ekonomi demi memperkuat ekonomi lokal yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menciptakan sinergitas antara pelaku usaha dan instansi terkait diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan prima bagi setiap masyarakatkhususnya pelaku usaha dalam hal pembuatan perijinan usaha yang dapat diperoleh dengan cepat, murah, dan ramah serta untuk mengakses lembaga-lembaga permodalan dapat kiranya difasilitasi oleh pemerintah sehingga sektor riil akan dapat bergerak lebih nyata karena pelaku usaha memiliki modal yang cukupuntuk meningkatkan produktifitas dan akses informasi dapat kiranya dibangun dengan penyebaran yang merata agar supaya pelaku usaha mendapatkan informasi dengan mudah dan akurat

Di samping itu juga pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD juga perlu peningkatan dalam hal peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyelenggaraan fasilitasi kebijakan perekonomian khususnya dalam fasilitasi TPID, TPAKD, BUMD dan BLUD diperlukan penguatan-penguatan terhadap beberapa hal yang merupakan akar permasalahan dari hal tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Belum tersedianya penyusunan perencanaan sistem informasi pembinaan perekonomian.

   Untuk penangan akar masalah ini, diperlukan adanya suatu perencanaan system pembinaan perekonomian yang disusun dan diinformasikan kepada seluruh stakeholder, agar dalam penyelenggaraan fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah, fasilitasi akses keuangan daerah bagi masyarakat pengusaha kepada Lembaga-lembaga jasa keuangan dapat lebih memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah

b. Kurangnya fasilitasi dan kerjasama antar Lembaga terkait

   Fasilitasi dan kerja sama yang selama ini dibangun dengan pihak Bank Indonesia dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu lebih ditingkatkan dan juga perlu lebih melibatkan stakeholder terkait lainnya, baik itu dari Lembaga/instansi keuangan lainnya, perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten serta masyarakat-masyarakat pengusaha mikro maupun makro.

c. Rendahnya kualitas SDM pembina dan pengelola BUMD dan BLUD

   Pembinaan BUMD dan BLUD merupakan babak baru dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, hal ini diperlukan penguatan dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pembina BUMD dan BLUD. Kemudian dalam mendukung pencapaian peningkatan Pendapatan Daerah perlu adanya peningkatan Kapasitas terhadap SDM Pengelola BUMD dan BLUD mulai dari system perekrutan sampai dengan cara-cara pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Perumusan Kebijakan, Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Pembangunan Daerah Belum Maksimal

   Dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran, Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) membutuhkan suatu sistem yang dapat teringtegrasi langsung kepada setiap SKPD dan Kabupaten yang ada sehingga proses pengawasan realiasasi penyerapan anggaran dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk melihat perkembangan dalam penyerapan anggaran dalam pengambilan kebijakan efisien.

   TEPRA diharapkan dapat menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan APBN/APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, TEPRA juga diharapkan dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, roda perekonomian dapat bergerak dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Adapun akar masalah dari tidak maksimalnya perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan administrasi pembangunan antara lain :

a) Kurang efektifnya implementasi sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah.

   Dalam akar masalah ini pelaksanaan penggunaan system pengendalian pembangunan daerah belum efektif diimplemantasikan pada masing-masing Perangkat Daerah baiktu di Provinsi maupun Kabupaten, untuk itu diperlukan penguatan-penguatan dalam mengawal implemantasi penggunaan aplikasi ini.

b) Lemahnya koordinasi dan penguatan integrasi sistem penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah.

   Memasui era digitalisasi dan seiring perkembangan teknologi, banyaknya Terobosan-terobosan baru dalam mendukung percepatan administrasi embangunan daerah salah satunya dapat dilihat dengan beraneka ragamnya aplikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan, hal ini juga perlu monitoring dan kontrol terhadap adopsi penggunaan aplikasi sehingga tidak terjadinya penggunaan aplikasi yang banyak namun dengan fungsi yang hamper sama.

   Monitoring dimaksudkan agar aplikasi yang digunakan dalam pengawasan pembangunan daerah baik itu aplikasi perencanaan, aplikasi pengelolaan keuangan maupun aplikasi pelaporan dapat terintegrasi satu sama lain dan tidak terdapat lagi penggunaan aplikasi berbeda dengan memiliki fungsi yang hampir sama.

d. Belum Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa

   Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

   1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa

      Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah pusat maupun daerah terus menyiapkan regulasi yang dianggap dapan mendukung percepatan proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Bukan hanya itu, pengembangan system SPSE juga terus diselaraskan.

      Kendati demikian, nampaknya percepatan proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal dicapai oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Lambatnya proses perencanaan, ketidak cakapan pelaku pengadaan dan faktor-faktor lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi penyebab keterlambatan. Akibatnya sering ditemui masalah dalam hal realisasi dan pembayaran pekerjaan.

Hal ini menjadi sangat penting untul mendapat perhatian serius. Kolaborasi kerja antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan semua stake holders harus semakin ditingkatkan. Demikian pula dengan kegiatan monitoring pimpinan yang efektif sangat dibutuhkan.

2. Belum Optimalnya Kapasitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat menentukan efektifitas proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Mulai dari proses perencanaan dampai dengan selesainya pekerajaan. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas SDM perlu mendapat perhatian yang serius.

Saat ini Biro Pengadaan Barang dan jasa memiliki 23 orang dari kebutuhan 44 orang dengan persentase 52,27% pada formasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (kurang dari target 60%). Selain itu juga belum memiliki personil perencana, pengelola kontrak dan pengelola swakelola. Belum lagi kebutuhan personil dalam bidang kelembagaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Selain itu, kebutuhan SDM eksternal Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga perlu mendapat perhatian. Termasuk di dalamnya ketersediaan SDM pelaku pengadaan pada setiap perangkat daerah dan pembinaan penyedia sebagai mitra.

Semua ini perlu dikolaborasikan agar efektifitas proses pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan.

3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak hanya berfokus pada proses pemilihan penyedia barang jasa saja. Pada sisi lain, aspek lain seperti kelembagaan dan advokasi juga menjadi prioritas utama. Inilah ruh dari transformasi Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Pada sisi kelembagaan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dituntut untuk menjadi Lembaga dengan manajemen yang baik. Hal ini dilakukan dengan pemenuhan standarisasi dan pola kerja yang standar. Demikian pula dalam menjalankan fungsi koordinator UKPBJ kabupaten/kota di Sulawesi Barat.

Pada Aspek Advokasi, keberadaan UKPBJ dituntut untuk selalu memberi pendampingan. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi yang berkesinambungan menjadi sangat penting. Demikian pula kegiatan upgrading pengetahuan melalui diklat, sertifikasi dan sosialisasi.

4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara eletronik

Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pengadaan yang sudah ada. Pengelolaan perangkat yang baik akan sangat menentukan kelancaran proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, LPSE memegang peranan yang sangat penting.

Pertama, pemenuhan SDM pengelolaan LPSE. Dibutuhkan ketersediaan SDM yang professional untuk mengelola bagian-bagian seperti admin. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas. Selain itu, bertambahnya aplikasi dan perubahan domain seperti SPSE dan INAPROC sangat membutuhkan pengelola yang handal demi mewujudkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

Kedua, pemenuhan sarana-prasarana. LPSE dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pendampingan memerlukan adanya sarana yang memadai. Terutama dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Ketiga, adalah pengeloaan informasi yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan bila ada koordinasi yang baik dengan pihak lain, terutama yang membidangi keuangan dan perencanaan. Selain itu keberadaan aplikasi lokal penunjang yang baik akan sangat mendukung kinerja LPSE.

e. Belum Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

   Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   Upaya untuk memperbaiki tata kepemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

2. Belum Optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isu akuntabilitas menekankan pentingnya membangun sistem akuntabilitas aparatur, baik menyangkut perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penetapan kinerja, pengorganisasian, penatausahaan, monitoring, pengendalian maupun pelaporannya.

3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi peningkatan pelayanan publik

   Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

   Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/ prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

4. Belum optimalnya penataan dan fasilitasi kelembagaan pemerintah daerah

   Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-egineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi". Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

   Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

   Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

f. Belum Optimalnya pelaksanaan pelayanan kerumahtanggan, administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, administrasi pimpinan serta fasilitasi perangkat daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi isu strategis dimaksud adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kapasitas SDM baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun pemerataan distribusi, berdampak pada lambatnya penyelesaian dokumen kebijakan, peraturan, dan administrasi pemerintahan, kurangnya responsivitas terhadap dinamika tugas-tugas koordinatif dan pelayanan publik, serta tidak optimalnya pemanfaatan teknologi dan sistem digital pemerintahan (SPBE).

Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis dan fungsional yang berkelanjutan; Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi; Penempatan ASN belum sepenuhnya berbasis kompetensi (merit system belum maksimal); Kesenjangan kemampuan SDM antarunit; Kurangnya regenerasi aparatur muda pada jabatan strategis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya-upaya seperti meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui pelatihan berjenjang dan sertifikasi kompetensi; Mengembangkan manajemen talenta dan penataan SDM berbasis merit system; Mendorong digitalisasi kerja dan pemanfaatan teknologi untuk menutup celah keterbatasan SDM; Pemenuhan kebutuhan SDM prioritas melalui rekrutmen, redistribusi, dan promosi jabatan sesuai kebutuhan biro.

Sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah-masalah tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Menyusun rencana kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Daerah secara sistematis; Optimalisasi pemanfaatan Balai Diklat, BPSDM, dan lembaga pelatihan mitra; Penerapan sistem evaluasi kinerja pegawai berbasis output dan outcome; Penyediaan platform belajar mandiri berbasis digital (learning management system); Penguatan kolaborasi antarbiro untuk efisiensi SDM lintas fungsi.

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah (BMD) masih menghadapi berbagai kendala, seperti Banyak aset belum tercatat dengan baik atau tidak sesuai kondisi riil; Belum adanya sistem digital inventarisasi yang andal dan terkini; Penataan dan pemanfaatan aset belum optimal, termasuk kendaraan dinas, peralatan kantor, dan barang persediaan.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM yang khusus menangani aset secara profesional dan bersertifikasi; Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah; Lemahnya koordinasi antara pengguna dan pengelola aset; Ketidakteraturan dalam pencatatan mutasi, penghapusan dan pengamanan aset.

Persoalan tersebut dapat berdampak pada adanya potensi kehilangan aset daerah dan pemborosan anggaran; Lemahnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah; Terhambatnya pelayanan administrasi dan operasional akibat distribusi aset yang tidak efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya-upaya seperti Digitalisasi penuh manajemen aset melalui sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi; Penugasan unit kerja khusus pengelolaan aset dengan SDM kompeten; Inventarisasi dan penertiban aset secara berkala dan terjadwal; Penyesuaian penggunaan aset dengan kebutuhan aktual unit kerja.

Sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan strategi pemecahan masalah-masalah tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai Penguatan tata kelola aset berbasis peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas; Peningkatan kapasitas teknis aparatur pengelola aset melalui pelatihan dan sertifikasi; Penyusunan rencana kebutuhan dan pemanfaatan aset lima tahunan; Implementasi audit internal berkala atas aset dan barang milik daerah; Pengembangan dashboard monitoring aset yang mudah diakses oleh pimpinan

Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian

Pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah milik daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebgai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan prinsip *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan barang milik daerah.

Sistem pengelolaan barang milik daerah tidak hanya mencakup pengelolaan barang milik daerah tetapi juga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimulai dari proses perencanaan pengadaan sebagai pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran sampai pada proses penghapusan yang dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

Barang milik daerah sekretariat daerah yang penatausahaannya berada pada Biro Umum mempunyai beberapa tantangan kedepannya diantaranya tingkat kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan anggaran yang kurang memadai, barang milik daerah yang masih dikuasai pihak lain atau sudah tidak diketahui keberadaannya, pencatatan dan kodefikasi barang milik daerah belum optimal serta barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah selain itu juga penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal.

Dalam pencatatan dan kodefikas barang milik daerah juga msih perlu di optimalkan mengingat keadaan pasca bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan beberapa barang milik daerah harus dilakukan penghapusan dan pencatatan ulang.

3. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pimpinan dan perkantoran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan merupakan ujung tombak pelayanan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pimpinan atau pejabat pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pengelolaan administrasi tidak dilakukan dengan baik pula.

Salah satu aspek yang sangat mendukung kinerja urusan pemerintahan yaitu dengan adanya pengelolaan administrasi pimpinan yang meliputi pelayanan persuratan, pengarsipan dokumen, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan serta pelayanan keprotokolan.

Pengelolaan administrasi pimpinan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan tindakan pimpinan sebagai pejabat pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dapat dilihat dari tata kelola administrasi yang baik serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pengelolaan administrasi pemerintahan terlebih pada pelayanan pengelolaan administrasi pimpinan.

Pengelolaan administrasi pada pemerintahan daerah yang mutakhir menuju percepatan pembangunan yang maju dan bersaing sudah selayaknya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi infomasi berbasis digital dan sistem daring. Dengan demikian, pelayanan pimpinan yang membutuhkan fasilitasi tata kelola administrasi baik pada aspek administrasi persuratan dan pengarsipan, penyiapan materi pimpinan, fasilitasi komunikasi, pelaksanaan acara dan keprotokoleran dapat dilakukan dengan cepat dengan sistem yang terintegrasi

Biro Umum Sekretariat Daerah menjalankan fungsi utama yaitu pelayanan pimpinan dan perangkat daerah antara lain untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan pelayanan kerumahtanggan di lingkup perkantoran maupun rumah jabatan.

4. Belum optimalnya penyiapan materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan

   Fasilitasi materi, komunikasi dan keprotokoleran pimpinan merupakan hal yang sangat perlu mendapat perhatian mengingat tertib dan lancarnya kegaitan pimpinan ditentuntakan pengaturan acaara dan penyiapan materi serta komunikasi antar penyelenggaran kegiatan.

Perlunya peningkatan keterampilan dasar sangat diperlukan dikarenakan sumberdaya yang ada masih kurang memahami terkait keprotokoleran. Pelatihan terkait penyiapan materi pinpinan juga perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas materi pimpinan serta kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pendampingan pimpinan masih kurang efektif. Selain itu belum adanya ASN yang berertifikasi dan memenuhi standar menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD merupakan susunan awal dari program kerja dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan yang telah direview dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pada tahapan RKPD.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ketimpangan atau ketidaksesuaian anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan atau rasionalisasi anggaran dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD tahun anggaran 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 2.4 (T-C31)
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Barat

NO	KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		SEKRETARIAT DAERAH			**205,748,159,804**			**150,445,106,844**	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**71,032,159,804**			**44,187,815,521**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**71,032,159,804**			**44,187,815,521**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**71,032,159,804**			**44,187,815,521**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**4,365,220,153**			**1,347,222,292**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100 2,70 3,90 72**	**4,365,220,153**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100 2,70 3,90 72**	**1,347,222,292**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD***	**13,92 Poin 11,70 Poin 23,33 Poin 25,42 Poin**	**178,306,584**	***Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD***	**13,92 Poin 11,70 Poin 23,33 Poin 25,42 Poin**	**97,750,000**	
	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	38,296,584	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	65,000,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	4,250,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22,300,000	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5,000,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	2,250,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2,250,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	37,500,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	5,000,000	
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20,210,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	14,000,000	
	40101102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD*** ***Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD***	**100 Persen 100 Persen**	**70,000,000**	***Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD*** ***Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD***	**100 Persen 100 Persen**	**4,124,816**	
	4.01011E+11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	2,100,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	787,536	
	4.01011E+11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	4 Laporan	1,237,280	
	4.01011E+11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	-	
	40101103	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD***	**100 Persen**	**100,000,000**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD***	**100 Persen**	**3,000,000**	
	4.01011E+11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	3,000,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	1 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi*	1 Laporan	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			*Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*			
	4.01011E+11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	-	
	4.01011E+11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	-	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD***	**100 Persen**	**473,345,446**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD***	**100 Persen**	**271,553,880**	
	4.01011E+11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	7,953,900	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	1 Unit	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72,312,000	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	0 Paket	-	
	4.01011E+11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	175,450,000	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	213,422,880	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	17,200,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	13,009,000	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	52,320,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1 Orang	30,261,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	22,441,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	17,870,000	
	4.01011E+11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	112,659,546	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0 Orang	10,000,000	
	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD***	**100 Persen**	**2,030,768,123**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD***	**100 Persen**	**531,551,996**	
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	9,785,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	0 Paket	-	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	250,000,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	56,200,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200,000,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	42,850,800	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	150,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan/Material							
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	200,000,000	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	2 Paket	28,992,000	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	630,768,123	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	370,000,196	
	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	150,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150,000,000	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	23,724,000	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 Persen**	**1,162,480,000**	***Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 Persen**	**216,701,600**	
	4.01011E+11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	324,000,000	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	289,800,000	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	350,900,000	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	162,201,600	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	98,000,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	99,780,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	54,500,000	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**10,000,000**	***Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**-**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	0 Laporan	-	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**340,320,000**	***Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**222,540,000**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	155,320,000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	126,110,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	60,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan Mebel							
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	25,000,000	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	50,000,000	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	9 Unit	19,270,000	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	5 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	5 Unit	77,160,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			*yang Dipelihara/Direhabilitasi*			
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**			**2,845,096,651**			**1,075,000,000**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	**Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan) Kinerja Penyelenggaran Daerah**	**100 2,69 (sedang)**	**2,845,096,651**	**Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan) Kinerja Penyelenggaran Daerah**	**100 2,69 (sedang)**	**1,075,000,000**	
	40103101	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	***Tersedianya dokumen tugas pemerintahan yang tersedia***	**5 Dokumen**	**993,964,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan***	**1 Dokumen 1 Dokumen**	**344,207,000**	
	4.01031E+11	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	352,300,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan*	1 Dokumen	150,000,000	
	4.01031E+11	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	311,333,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum*	1 Dokumen	86,589,384	
	4.01031E+11	Fasilitasi Penataan Wilayah							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	330,331,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah*	1 Dokumen	107,617,616	
	40103102	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	***Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia***	**5 Dokumen**	**1,195,764,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia***	**2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen**	**530,000,000**	
	4.01031E+11	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	444,543,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD*	2 Dokumen	202,348,000	
	4.01031E+11	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	0 Dokumen	300,321,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan*	0 Dokumen	-	
	4.01031E+11	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	450,900,000	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan*	2 Laporan	327,652,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	40103103	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah**	**3 Dokumen**	**655,368,651**	***Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah***	**1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen**	**200,793,000**	
	4.01031E+11	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah							
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	222,430,000	*Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi*	1 Dokumen	70,000,000	
	4.01031E+11	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta							
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,100,000	*Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi*	1 Dokumen	70,000,000	
	4.01031E+11	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	232,838,651	*Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi*	1 Laporan	60,793,000	
3.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**63,821,843,000**			**41,765,593,229**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Jumlah barang yang melalui bandaraJumlah orang yang melalui bandaraProporsi individu yang menggunakan internet**	434.61860.08573.16	**63,821,843,000**	**Jumlah barang yang melalui bandaraJumlah orang yang melalui bandaraProporsi individu yang menggunakan internet**	434.61860.0857.316	**41,765,593,229**	
	40104101	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	***Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama***	**100 Persen**	**54,757,900,000**	***Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama***	**100 Persen**	**23,333,825,286**	
	4.01041E+11	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1000 Unit	50,642,900,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola*	1300 Unit	11,110,825,286	
	4.01041E+11	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual							
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 Lembaga	4,115,000,000	*Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi*	35 Lembaga	12,223,000,000	
	40104102	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	***Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar***	**3 Dokumen**	**8,286,317,000**	***Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar***	**3 Dokumen**	**15,151,496,423**	
	4.01041E+11	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	2 Dokumen	7,779,800,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan*	800 Dokumen	15,141,496,423	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			*Rakyat Bidang Pendidikan*			
	4.01041E+11	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	255,647,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan*	1 Dokumen	5,000,000	
	4.01041E+11	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	250,870,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial*	1 Dokumen	5,000,000	
	40104103	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	***Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar***	**3 Dokumen**	**777,626,000**	***Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar***	**3 Dokumen**	**3,280,271,520**	
	4.01041E+11	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	255,439,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata*	1 Dokumen	5,000,000	
	4.01041E+11	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	266,743,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja*	1 Dokumen	1,214,600,000	
	4.01041E+11	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen	255,444,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan*	2 Dokumen	2,060,671,520	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM			**4,375,000,000**			**1,792,765,390**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4,375,000,000**			**1,792,765,390**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**4,375,000,000**			**1,792,765,390**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**2,375,000,000**			**521,076,778**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**2,375,000,000**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**521,076,778**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**100,000,000**	***Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan**	**117,636,400**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	40,000,000	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	16,811,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	11,419,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1,249,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1,011,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1,027,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	85,337,200	
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	781,200	
	40101102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**60,000,000**	***Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/***	**1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan**	**123,768,358**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
	4.01011E+11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1 Dokumen	79,209,200	
	4.01011E+11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	1,183,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1 Dokumen	1,087,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1,571,200	
	4.01011E+11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	877,200	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	39,840,358	
	40101103	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**25,000,000**	***Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD***	**1 Laporan**	**4,301,200**	
	4.01011E+11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	4,301,200	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**340,000,000**	***Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**1 Dokumen1 Orang**	**27,319,200**	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75,000,000	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	-	
	4.01011E+11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15,000,000	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	27,319,200	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	100,000,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1 Orang	-	
	4.01011E+11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	150,000,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	-	
	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1,400,000,000**	***Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan***	**1 Dokumen 90 Laporan 2 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket**	**141,658,800**	
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	-	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250,000,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	17,000,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	5,116,200	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan/Material							
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	200,000,000	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	750,000	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	500,000,000	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	60 Laporan	80,865,400	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	1 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150,000,000	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	37,927,200	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**150,000,000**	***Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan***	**5 Unit**	**-**	
	4.01011E+11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150,000,000	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	-	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**50,000,000**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	**1 Laporan**	**17,640,320**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	17,640,320	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**250,000,000**	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi***	**1 Unit 13 Unit 11 Unit 10 Unit 10 Unit**	**88,752,500**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	100,000,000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	13 Unit	66,240,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	100,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	13 Unit	11,752,500	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	-		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan*	-		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	*Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	7,100,000	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	3,660,000	
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**			**2,000,000,000**			**1,271,688,612**	
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan dan fasilitasi bantuan hukum yang diselesaikan]	**Indeks Reformasi Hukum Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan Persentase Capaian Aksi HAM Persentase Produk Hukum yang di hasilkan**	**100 96**	**2,000,000,000**	**Indeks Reformasi Hukum Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan Persentase Capaian Aksi HAM Persentase Produk Hukum yang di hasilkan**	**100 96**	**1,271,688,612**	
	40105101	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**-**	**-**	**1,100,000,000**	***Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya***	**150 Dokumen 530 Dokumen 40 Dokumen 620 Dokumen**	**660,484,612**	
	4.01051E+11	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan							
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen	300,000,000	*Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun*	40 Dokumen	296,803,612	
	4.01051E+11	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan							
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	550 Dokumen	200,000,000	*Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun*	500 Dokumen	71,056,000	
	4.01051E+11	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya							
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	640 Dokumen	200,000,000	*Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya*	560 Dokumen	97,112,000	
	4.01051E+11	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota							
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	155 Dokumen	400,000,000	*Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi*	150 Dokumen	195,513,000	
	40105102	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**-**	**-**	**900,000,000**	***Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan***	**3 Kasus 6 Kasus**	**611,204,000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01051E+11	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum							
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	550,000,000	*Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan*	3 Kasus	480,402,000	
	4.01051E+11	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM							
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	2 Kasus	350,000,000	*Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan*	6 Kasus	130,802,000	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**7,377,000,000**			**1,273,955,045**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**7,377,000,000**			**1,273,955,045**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**7,377,000,000**			**1,273,955,045**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**3,862,000,000**			**694,787,870**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00 2,70 3,90 72**	**3,862,000,000**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00 2,70 3,90 72**	**694,787,870**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**238,000,000**	**-**	**-**	**110,848,976**	
	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55,000,000	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	30,681,816	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25,000,000	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 Laporan	83,000,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan*	2 Laporan	80,167,160	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			*Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	0 Laporan	-	
	40101102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**213,000,000**	**-**	**-**	**149,061,680**	
	4.01011E+11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	0 Laporan	-	
	4.01011E+11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	153,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	149,061,680	
	4.01011E+11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10,000,000	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	0 Dokumen	-	
	40101103	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**130,000,000**	**-**	**-**	**4,720,640**	
	4.01011E+11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen	30,0	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik*	0 Dokumen		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Milik Daerah SKPD		00,000	*Daerah SKPD*		-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	30,0 00,000	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	0 Laporan	-	
	4.01011E+11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	30,0 00,000	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	0 Laporan	-	
	4.01011E+11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40,0 00,000	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	4, 720,640	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**430,0 00,000**	**-**	**-**	**58, 474,534**	
	4.01011E+11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	30 Unit	50,0 00,000	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	1 Unit	24, 857,894	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50,0 00,000	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	0 Paket	-	
	4.01011E+11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	50,0 00,000	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen	130,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30 Dokumen	50,0 00,000	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50,0 00,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	13 Orang	33, 616,640	
	4.01011E+11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	50,0 00,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	0 Orang	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1,650,000,000**	**-**	**-**	**238,674,207**	
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	350,000,000	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	7,110,550	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	65,000,000	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1,924,710	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	26,830,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1,999,200	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	180,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	400,000,000	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	8 Laporan	147,142,587	
	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	180,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	180,000,000	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	6 Dokumen	53,667,160	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**738,000,000**	**-**	**-**	**-**	
	4.01011E+11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	550,000,000	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	170,000,000	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	-	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**18,000,000**	**-**	**-**	**1,123,546**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1,123,546	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**445,000,000**	**-**	**-**	**131,884,287**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	280,000,000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	9 Unit	129,630,767	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15,000,000	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	2,253,520	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	10 Unit	25,000,000	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	-		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			*yang Dipelihara/Direhabilitasi*		-	
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**2,905,000,000**			**448,915,606**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Return on Aset (ROA) BUMD (%)**	**30**	**2,905,000,000**	**Return on Aset (ROA) BUMD (%)**	**30**	**448,915,606**	
	40106101	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	***Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**95 Persen**	**1,350,000,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan***	**4 Dokumen 4 Dokumen 95 Persen**	**253,043,019**	
	4.01061E+11	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	12 Dokumen	1,150,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro*	4 Dokumen	126,686,868	
	4.01061E+11	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	200,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro*	4 Dokumen	126,356,151	
	40106102	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**-**	**-**	**420,000,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan AirJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan HidupJumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan***	**1 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen**	**3,245,300**	
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	160,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	0 Dokumen	-	
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	100,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup*	0 Dokumen	-	
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	6 Dokumen	160,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air*	1 Dokumen	3,245,300	
	40106103	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**-**	**-**	**1,135,000,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,***	**0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen**	**192,627,287**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD ***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD*** ***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi*** ***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha***	**4 Dokumen**		
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4 Dokumen	400,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha*	6 Dokumen	192,627,287	
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	6 Dokumen	485,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi*	3 Dokumen	-	
	4.01061E+11	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	5 Dokumen	250,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah*	4 Dokumen	-	
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**			**610,000,000**			**130,251,569**	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**91.5**	**610,000,000**	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**915.0**	**130,251,569**	
	40108101	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**-**	**-**	**390,000,000**	***Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD*** ***Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN*** ***Jumlah Laporan Hasil Pengendalian***	**0 Laporan** **2 Laporan** **2 Laporan**	**101,800,000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			
	4.01081E+11	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	6 Laporan	175,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN*	1 Laporan	28,400,000	
	4.01081E+11	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah							
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	215,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah*	1 Laporan	73,400,000	
	40108102	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**-**	**-**	**220,000,000**	***Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah***	**2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan**	**28,451,569**	
	4.01081E+11	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	220,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	2 Laporan	28,451,569	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			**4,735,000,000**			**3,266,292,439**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**4,735,000,000**			**3,266,292,439**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**4,735,000,000**			**3,266,292,439**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**2,685,000,000**			**2,206,801,919**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00 2,70 3,90 72**	**2,685,000,000**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	10000 2,70 3,90 72	**2,206,801,919**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPDNilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPDNilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPDNilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD***	**13,92 Poin11,70 Poin23,33 Poin25,42 Poin**	**150,000,000**	***Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPDJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPDJumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPDJumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen***	**1 Dokumen2 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen2 Laporan4 Laporan**	**83,698,720**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,0 00,000	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	28, 406,720	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10,0 00,000	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	2, 020,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,0 00,000	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	2,020,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,0 00,000	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	2,020,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,0 00,000	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	2, 020,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25,0 00,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	17, 020,000	
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,0 00,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	30, 192,000	
	40101102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPDTingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD***	**100 Persen100 Persen**	**1,665,0 00,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/***	**12 Dokumen1 Laporan2 Laporan**	**1,426, 364,000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
	4.01011E+11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	1,420,324,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2,520,000	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1,655,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	2 Laporan	3,520,000	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD***	**100 Persen**	**135,000,000**	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**15 Orang**	**100,261,000**	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	60,000,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-	-	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	75,000,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	15 Orang	100,261,000	
	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD***	**100 Persen**	**475,000,000**	***Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan***	**1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 5 Paket 5 Paket 2 Paket 1 Paket**	**285,521,400**	
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	-	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang*	0 Paket	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			yang Disediakan			*Disediakan*			
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	100,000,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	30 Paket	38,950,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25,000,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	7,900,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan/Material							
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	100,000,000	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	30 Paket	27,548,400	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	250,000,000	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	168,103,000	
	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	1 Dokumen	2,020,000	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	41,000,000	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 Persen**	**100,000,000**	***Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan***	**2 Unit** **4 Unit**	**53,090,800**	
	4.01011E+11	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Paket	17,297,800	
	4.01011E+11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100,000,000	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	35,793,000	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**10,000,000**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	**4 Laporan**	**15,000,000**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	10,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	15,000,000	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**150,000,000**	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya***	**1 Unit** **7 Unit** **2 Unit** **30 Unit** **1 Unit**	**242,865,999**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75,000,000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	2 Unit	44,940,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	75,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	44,630,000	
	4.01011E+11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	33,140,000	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0 Unit	-	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	120,155,999	
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**			**2,050,000,000**			**1,059,490,520**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	**Level Kematangan UKPBJ**	**Level 3**	**2,050,000,000**	**Level Kematangan UKPBJ**	**Level 3**	**1,059,490,520**	
	40107101	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	***Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Prosedur***	**100 Persen**	**750,000,000**	***Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*** **4 Laporan** ***Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*** **4 Laporan** ***Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*** **2 Laporan**		**440,561,000**	
	4.01071E+11	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	275,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*	2 Laporan	102,127,000	
	4.01071E+11	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	275,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*	4 Laporan	167,096,000	
	4.01071E+11	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	200,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa*	4 Laporan	171,338,000	
	40107102	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	***Persentase Pelaku Pengadaan dalam Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Eletronik***	**100 Persen**	**650,000,000**	***Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa***	**4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan**	**318,686,000**	
	4.01071E+11	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	4 Laporan	200,000,000	*Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik*	4 Laporan	120,568,000	
	4.01071E+11	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	250,000,000	*Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	4 Laporan	100,212,000	
	4.01071E+11	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan	200,000,000	*Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	4 Laporan	97,906,000	
	40107103	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	***Persentase Peningkatan Pemahaman Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa***	**100 Persen**	**650,000,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa***	**2 Dokumen 2 Dokumen 15 Orang**	**300,243,520**	
	4.01071E+11	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	30 Orang	200,000,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa*	15 Orang	94,477,520	
	4.01071E+11	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	200,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa*	2 Dokumen	107,860,000	
	4.01071E+11	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	250,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa*	2 Dokumen	97,906,000	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI			**2,512,000,000**			**1,581,876,739**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**2,512,000,000**			**1,581,876,739**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**2,512,000,000**			**1,581,876,739**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**1,582,000,000**			**833,117,563**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**1,582,000,000**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**833,117,563**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**435,000,000**	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan**	**322,657,396**	
	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000,000	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	57,112,595	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	270,000,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	204,433,281	
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	65,000,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	61,111,520	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**100,000,000**	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan***	**9 Orang**	**8,055,000**	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	70,000,000	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	-	-	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30,000,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 Orang	8,055,000	
	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**687,000,000**	***Jumlah Dokumen Dukungan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Paket Bahan/Bahan yang DisediakanJumlah***	**1 Dokumen1 Dokumen20 Laporan1 Paket2 Paket2 Paket1 Paket2 Paket1 Paket**	**381,890,321**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	4, 197,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	200,0 00,000	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	13, 576,500	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10,0 00,000	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	3, 287,225	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Paket	50,0 00,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	27, 147,000	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket	11,0 00,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	5, 665,875	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan/Material							
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	60 Paket	90,0 00,000	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	61, 941,540	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	200,0 00,000	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	20 Laporan	137, 819,051	
	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	6,0 00,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	1 Dokumen	4, 991,010	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	120,0 00,000	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	123, 265,120	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**120,0 00,000**	***Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan***	**-**	**-**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Laporan	60,000,000	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	60,000,000	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-	-	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**70,000,000**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***	**1 Laporan**	**61,968,846**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	70,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	61,968,846	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**170,000,000**	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya***	**1 Unit 12 Unit**	**58,546,000**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	110,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	58,546,000	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	60,000,000	*0*	1 0	-	
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**			**930,000,000**			**748,759,176**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah]	**Indeks Ber-Akhlak Indeks Kelembagaan**	**70 74,7**	**930,000,000**	**Indeks Ber-Akhlak Indeks Kelembagaan**	**70 74,7**	**748,759,176**	
	40102101	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**-**	**-**	**340,000,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota***	**6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen**	**248,562,000**	
	4.01021E+11	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi							
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	160,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	110,600,000	
	4.01021E+11	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	6 Dokumen	80,0	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi*	6 Dokumen	50,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		00,000	*Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*		000,000	
	4.01021E+11	Penataan Analisis Jabatan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	3 Dokumen	100,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan*	3 Dokumen	87, 962,000	
	40102102	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**-**	**-**	**590,0 00,000**	***Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja***	**3 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 37 Dokumen 1 Laporan**	**500, 197,176**	
	4.01021E+11	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	130,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	112, 405,500	
	4.01021E+11	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja							
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7 Dokumen	110,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*	7 Dokumen	106, 512,000	
	4.01021E+11	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja							
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	130,0 00,000	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja*	1 Laporan	73, 473,500	
	4.01021E+11	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	41 Dokumen	110,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan*	37 Dokumen	100, 631,000	
	4.01021E+11	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	110,0 00,000	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik*	3 Dokumen	107, 175,176	
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM			**115,717,0 00,000**			**98,342, 401,710**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**115,717,0 00,000**			**98,342, 401,710**	
	401.00	**SEKRETARIAT DAERAH**			**115,717,0 00,000**			**98,342, 401,710**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**115,717,0 00,000**			**98,342, 401,710**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**115,717,0 00,000**	**Indeks Pengelolaan Aset OPD Indeks SPBE OPD Nilai SAKIP OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100,00 2,70 3,90 72**	**98,342, 401,710**	
	40101101	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	***Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup***	**18 Poin 13 Poin 24 Poin**	**719,5 00,000**	***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja***	**12 Dokumen 10 Dokumen 18 Poin**	**212, 674,000**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Perangkat Daerah	***OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD***	**27 Poin**		***Perangkat Daerah Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD***	**13 Poin 24 Poin 27 Poin**		
	4.01011E+11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	300,000,000	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11 Dokumen	135,921,500	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35,000,000	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	42,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15,500,000	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	22,000,000	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25,000,000	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	280,000,000	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Laporan	76,752,500	
	40101102	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPDTingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD***	**100 Persen100 Persen**	**32,607,000,000**	***Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiJumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap***	**5 Dokumen5 Dokumen12 Dokumen21600Dokumen 3360 OB100 Persen100 Persen**	**29,659,491,898**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Perencanaan Lingkup OPDTingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD			
	4.01011E+11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3360 Orang/ Bulan	31,000,000,000	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	3360 Orang/ Bulan	28,449,604,398	
	4.01011E+11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	340,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	279,944,400	
	4.01011E+11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21600 Dokumen	790,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	21600 Dokumen	703,914,800	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	265,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	12 Dokumen	173,275,500	
	4.01011E+11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	92,000,000	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	5 Dokumen	52,752,800	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	120,000,000	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-	-	
	40101103	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD***	**100 Persen**	**4,719,000,000**	***Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*** **6 Laporan** ***Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*** **2 Laporan** ***Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD*** **5 Dokumen 100 Persen**		**1,300,564,200**	
	4.01011E+11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	30 Dokumen	395,000,000	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	338,199,900	
	4.01011E+11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	3,100,000,000	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	162,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	630,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	32 Laporan	680,653,300	
	4.01011E+11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	57,000,000	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	375,000,000	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Laporan	281,711,000	
	4.01.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	**100 Persen**	**92,000,000**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	**100 Persen**	**-**	
	4.01011E+11	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah							
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	92,000,000	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	-	-	
	40101105	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD***	**100 Persen**	**1,596,000,000**	***Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD***	**75 Dokumen 120 Orang 12 Paket 100 Persen**	**1,794,044,500**	
	4.01011E+11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	400,000,000	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	10 Paket	651,500,000	
	4.01011E+11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	295,000,000	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	130,000,000	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	38 Dokumen	295,972,500	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	4.01011E+11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	76 Dokumen	196,000,000	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	38 Dokumen	295,972,500	
	4.01011E+11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	120,000,000	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-	-	
	4.01011E+11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	455,000,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	118 Orang	846,572,000	
	40101106	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD***	**100 Persen**	**8,517,000,000**	***Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan***	**261Dokumen12 laporan350 Laporan12 Paket12 Paket12 Paket**	**9,879,274,700**	
	4.01011E+11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	890,000,000	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	597,202,500	
	4.01011E+11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	780,000,000	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	570,009,700	
	4.01011E+11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3,600,000,000	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	3,387,653,100	
	4.01011E+11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	338,000,000	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,926,000,000	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	4,767,655,100	
	4.01011E+11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	756,000,000	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	350 Laporan	416,736,800	
	4.01011E+11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	55,000,000	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	-	-	
	4.01011E+11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	172,000,000	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	261 Dokumen	140,017,500	
	40101107	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100 Persen**	**10,760,000,000**	***Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**10 Unit 200 Unit 100 Persen**	**10,866,220,500**	
	4.01011E+11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	4,560,000,000	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	10 Unit	6,470,000,000	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	1,600,000,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	-	-	
	4.01011E+11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	210 Unit	4,600,000,000	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	178 Unit	4,396,220,500	
	40101108	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**9,735,000,000**	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**48 laporan 36 Laporan 12 Laporan 100 Persen**	**11,196,012,175**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	365,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	376,619,700	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	3,870,0	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	48 Laporan	4,195,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		00,000	*Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		855,675	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5,500,000,000	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	36 Laporan	6,623,536,800	
	40101109	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 Persen**	**6,436,000,000**	***Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara***	**8 Unit 120 Unit 20 Unit 550 Unit**	**6,779,569,900**	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	1,359,000,000	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	20 Unit	1,298,085,500	
	4.01011E+11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	2,735,000,000	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	120 Unit	3,074,404,900	
	4.01011E+11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	595,000,000	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	550 Unit	860,023,500	
	4.01011E+11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1,747,000,000	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	8 Unit	1,547,056,000	
		[Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pimpinan]	**Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum**	**100**		**Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum**	**100**		
	40101111	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	***Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	**100 Persen**	**2,964,500,000**	***Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	**24 OB 24 OB**	**4,036,416,517**	
	401011110001.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	24Orang/	1,439,0	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan*	24Orang/	1,239,	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	00,000	*Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	Bulan	619,917	
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ Kegiatan	75,5 00,000	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-	-	
	4.01011E+11	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	1,450,0 00,000	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	24 Orang/ Bulan	2,796, 796,600	
	40101112	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	***Persentase Pengelolaan Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah***	**100 Persen**	**17,277,0 00,000**	***Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan***	**84 Paket 84 Paket 84 Paket**	**10,275, 576,620**	
	4.01011E+11	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	4,680,0 00,000	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	84 Paket	4,144, 878,940	
	4.01011E+11	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	4,000,0 00,000	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	84 Paket	3,312, 843,940	
	4.01011E+11	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	8,597,0 00,000	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	84 Paket	2,817, 853,740	
	40101113	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	***Persentase Pengelolaan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan***	**100 Persen**	**15,361,0 00,000**	***Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan***	**800 Laporan 12 Laporan**	**10,349, 435,100**	
	4.01011E+11	Penyiapan Materi Pimpinan							
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	175,0 00,000	*Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	800 Laporan	13,554,0 00,000	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	800 Laporan	9,286, 062,600	
	4.01011E+11	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	1,632,0 00,000	*Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan*	12 Laporan	1,063, 372,500	
	40101114	**Fasilitasi Keprotokolan**	***Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan***	**100 Persen 100 Persen**	**4,933,0 00,000**	***Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Pengelolaan***	**12 Laporan 750 Laporan**	**1,993, 121,600**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

						Hubungan Keprotokolan			
	4.01011E+11	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan	1,258,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara*	12 Laporan	769,247,100	
	4.01011E+11	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	2,375,000,000	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara*	0 Dokumen	-	
	4.01011E+11	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan							
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	750 Laporan	1,300,000,000	*Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan*	750 Laporan	1,223,874,500	
	J U M L A H				**205,748,159,804**			**150,445,106,844**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2026 tidak memiliki catatan usulan yang ditujukan bagi Sekretariat Daerah pada umumnya dan Biro-biro pada khususnya baik itu dari Masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan ataupun para stakeholder. Dengan demikian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2026 tidak memuat Program ataupun Kegiatan yang dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayana yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah:

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	**Membaiknya Pelayanan Publik**
		Meningkatnya Layanan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Bantuan Hukum
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Kelembagaan yang Efektif
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Kerumahtanggaan, Keuangan, Aset dan Administrasi Pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026

Program, kegiatan dan subkegiatan disusun berdasarkan ketentuan yang termuat pada Keputusan m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tujuan Pemutakhiran berdasarkan Permendagri 90/2019 yaitu Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran, Mewujudkan database SIPD terpadu, Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan, Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

Subkegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan maupun subkegiatan baik bersifat kuntitatif maupun kualitatif.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada Rencana Kerja Tahun 2026 sebagaimana termuat pada lampiran I T-C33.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dan telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPP Tahun 2026 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini memuat tujuan dan sasaran serta evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dokumen perencanaan yang memenuhi kaidah penyusunan yang baik akan berdampak pada pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang baik pula.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai dengan adanya komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Plh. Sekretaris Daerah,
Provinsi Sulawesi Barat



Drs. H. Herdin Ismail, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 197007011991011004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**44.187.815.521,00**							**82.319.674.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.187.815.521,00**							**82.319.674.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**44.187.815.521,00**							**82.319.674.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.347.222.292,00**						**-**	**4.566.950.000,00**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD* *Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD* *Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD* *Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD*	-			13,92 Poin 11,70 Poin 23,33 Poin 25,42 Poin	97.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	201.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		40.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		25.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		41.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	14.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		23.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD* *Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD*	-			100 Persen 100 Persen	4.124.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	77.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	787.536,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.237.280,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	-	-	-	-	-	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD*	-			100 Persen	3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD*	-			100 Persen	271.553.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	491.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	213.422.880,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		18.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		15.690.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	30.261.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		55.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	17.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		23.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		115.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD*	-			100 Persen	531.551.996,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	2.113.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.785.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	56.200.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		255.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	42.850.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		222.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	28.992.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		212.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	370.000.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		650.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		155.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	23.724.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		151.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	216.701.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	1.201.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		345.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	162.201.600,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		355.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	54.500.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	222.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	362.370.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	126.110.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		160.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		65.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		25.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**1.347.222.292,00**	-	-	-	-	-	-	**4.566.950.000,00**	-
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	19.270.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		55.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	77.160.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**1.075.000.000,00**						**-**	**3.136.380.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	**Efektivitas kerjasama daerah (persentase kerjasama daerah yang mencapai tujuan yang ditetapkan)** **Kinerja Penyelenggaran Daerah**	**100** **3,4 (Tinggi)**	**0** **1,39 (Sangat Rendah) (2023)**	**100** **2,6 (Sedang)**	**100** **2,69 (sedang)**	**1.075.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**3.136.380.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	344.207.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.172.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		477.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	86.589.384,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	107.617.616,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		345.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan* *Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah yang tersedia*	-			2 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	530.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.226.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	202.348.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		450.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		320.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	327.652.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		455.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi* *Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi* *Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi* *Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	200.793.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	737.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		250.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta														
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		232.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	60.793.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		254.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**41.765.593.229,00**						**-**	**74.616.344.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat]	**Jumlah barang yang melalui bandara** **Jumlah orang yang melalui bandara** **Proporsi individu yang menggunakan internet**	**461220** **83.00** **86696**	**417741** **48770** **66.61**	**426096** **53647** **69.88**	**434618** **60085** **73.16**	**41.765.593.229,00**	-	-	-	-	-	-	**74.616.344.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama*	-			100 Persen	23.333.825.286,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat	-	65.400.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				1300 Unit	11.110.825.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		60.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				35 Lembaga	12.223.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat		4.500.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Tersedianya Dokumen Pelayanan Dasar*	-			3 Dokumen	15.151.496.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	8.420.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				800 Dokumen	15.141.496.423,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		7.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		255.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Tersedianya Dokumen Non Pelayanan Dasar*	-			3 Dokumen	3.280.271.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	795.484.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		265.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1.214.600.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				2 Dokumen	2.060.671.520,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		260.054.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM						**1.792.765.390,00**							**4.760.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.792.765.390,00**							**4.760.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.792.765.390,00**							**4.760.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**521.076.778,00**						**-**	**2.660.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	117.636.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.811.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11.419.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.249.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.011.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.027.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	85.337.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	781.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	123.768.358,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	79.209.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.183.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.087.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.571.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	877.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	39.840.358,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	-			1 Laporan	4.301.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.301.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			1 Dokumen 1 Orang	27.319.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	27.319.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-			1 Dokumen 90 Laporan 2 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket	141.658.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	1.545.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.116.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	750.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	80.865.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	37.927.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			5 Unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			1 Laporan	17.640.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17.640.320,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	-			1 Unit 13 Unit 11 Unit 10 Unit 10 Unit	88.752.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat	-	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	66.240.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	11.752.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7.100.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**521.076.778,00**	-	-	-	-	-	-	**2.660.000.000,00**	-
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	3.660.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**1.271.688.612,00**						**-**	**2.100.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan dan fasilitasi bantuan hukum yang diselesaikan]	**Indeks Reformasi Hukum** **Persentase Bantuan Hukum yang diselesaikan** **Persentase Capaian Aksi HAM** **Persentase Produk Hukum yang di hasilkan**	**100** **98**	**100** **95**	**100** **95**	**100** **96**	**1.271.688.612,00**	-	-	-	-	-	-	**2.100.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi* *Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun* *Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun* *Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya*	-			150 Dokumen 530 Dokumen 40 Dokumen 620 Dokumen	660.484.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				40 Dokumen	296.803.612,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				500 Dokumen	71.056.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				560 Dokumen	97.112.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				150 Dokumen	195.513.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan* *Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan*	-			3 Kasus 6 Kasus	611.204.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				3 Kasus	480.402.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				6 Kasus	130.802.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**1.273.955.045,00**							**8.858.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.273.955.045,00**							**8.158.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.273.955.045,00**							**8.158.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**694.787.870,00**						**-**	**4.258.000.000,00**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**694.787.870,00**	-	-	-	-	-	-	**4.258.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	110.848.976,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	264.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.681.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	80.167.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		87.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	149.061.680,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	246.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**694.787.870,00**	-	-	-	-	-	-	**4.258.000.000,00**	-
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**694.787.870,00**	-	-	-	-	-	-	**4.258.000.000,00**	-
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	149.061.680,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		156.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.720.640,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.720.640,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	58.474.534,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	24.857.894,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	33.616.640,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	238.674.207,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.795.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.110.550,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.924.710,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.830.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.999.200,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	147.142.587,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	53.667.160,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	743.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.123.546,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.123.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.884.287,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	542.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	129.630.767,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.253.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		57.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**694.787.870,00**	-	-	-	-	-	-	**4.258.000.000,00**	-
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**448.915.606,00**						**-**	**3.230.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	**Return on Aset (ROA) BUMD (%)**	**35**	**26**	**28.30**	**30**	**448.915.606,00**	-	-	-	-	-	-	**3.230.000.000,00**	-
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro* *Persentase Pelaksanaan Sub Kegiatan*	-			4 Dokumen 4 Dokumen 95 Persen	253.043.019,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				4 Dokumen	126.686.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	126.356.151,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan*	-			1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	3.245.300,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	480.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				1 Dokumen	3.245.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha*	-			0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen	192.627.287,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				6 Dokumen	192.627.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				3 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				4 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**130.251.569,00**						**-**	**670.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan]	**Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**93.5**	**90.73**	**91**	**91.5**	**130.251.569,00**	-	-	-	-	-	-	**670.000.000,00**	-
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah*	-			0 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	101.800.000,00			-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-	-	430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				1 Laporan	28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-1. Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				1 Laporan	73.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah*	-			2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan	28.451.569,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				2 Laporan	28.451.569,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**700.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**700.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**0,00**						**-**	**700.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**700.000.000,00**	-
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**3.266.292.439,00**							**5.555.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.266.292.439,00**							**5.555.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.266.292.439,00**							**5.555.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**2.206.801.919,00**						**-**	**3.280.000.000,00**	
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**2.206.801.919,00**	-	-	-	-	-	-	**3.280.000.000,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	83.698.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	28.406.720,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	17.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.192.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	-			12 Dokumen 1 Laporan 2 Laporan	1.426.364.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.420.324.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.520.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	3.520.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		1.660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			15 Orang	100.261.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	100.261.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 5 Paket 5 Paket 2 Paket 1 Paket	285.521.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	38.950.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	7.900.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				30 Paket	27.548.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	168.103.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2.020.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-			2 Unit 4 Unit	53.090.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	17.297.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.793.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			4 Laporan	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas*	-			1 Unit 7 Unit 2 Unit 30 Unit 1 Unit	242.865.999,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	44.940.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	44.630.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	33.140.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	120.155.999,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**1.059.490.520,00**						**-**	**2.275.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa]	**Level Kematangan UKPBJ**	**Level 5**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**1.059.490.520,00**	-	-	-	-	-	-	**2.275.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa*	-			4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	440.561.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	102.127.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	167.096.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	171.338.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik* *Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa*	-			4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	318.686.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				4 Laporan	120.568.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	100.212.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Laporan	97.906.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa*	-			2 Dokumen 2 Dokumen 15 Orang	300.243.520,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan	-	725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				15 Orang	94.477.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	107.860.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	97.906.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaku Pengadaan		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI						**1.581.876.739,00**							**3.523.750.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.581.876.739,00**							**3.523.750.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.581.876.739,00**							**3.523.750.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**833.117.563,00**						**-**	**1.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4.30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**833.117.563,00**	-	-	-	-	-	-	**1.435.000.000,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan	322.657.396,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	57.112.595,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	204.433.281,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	61.111.520,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	-			9 Orang	8.055.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	8.055.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan/Bahan yang Disediakan* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	-			1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 1 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket	381.890.321,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.197.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	13.576.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.287.225,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	27.147.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.665.875,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	61.941.540,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	137.819.051,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.991.010,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	123.265.120,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	-			1 Laporan	61.968.846,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	61.968.846,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	-			1 Unit 12 Unit	58.546.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar	-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	58.546.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			0				1 0	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Biro Organisasi Setda Prov. Sulbar		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**748.759.176,00**						**-**	**2.088.750.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah]	**Indeks Ber-Akhlak** **Indeks Kelembagaan**	**80** **82,5**	**65.03** **69,08**	**67** **72,09**	**70** **74,7**	**748.759.176,00**	-	-	-	-	-	-	**2.088.750.000,00**	-
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan* *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota*	-			6 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	248.562.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	843.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	110.600.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		331.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				3 Dokumen	87.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		231.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik* *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi* *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan* *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja*	-			3 Dokumen 2 Dokumen 7 Dokumen 37 Dokumen 1 Laporan	500.197.176,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	-	1.245.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	112.405.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				7 Dokumen	106.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	73.473.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				37 Dokumen	100.631.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				3 Dokumen	107.175.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	OPD Provinsi dan Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat		281.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI
		SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM						**98.342.401.710,00**							**119.028.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**98.342.401.710,00**							**119.028.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**98.342.401.710,00**							**119.028.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**98.342.401.710,00**						**-**	**119.028.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	**Indeks Pengelolaan Aset OPD** **Indeks SPBE OPD** **Nilai SAKIP OPD** **Tingkat Capaian Kinerja Anggaran OPD**	**100.00** **3,10** **4,30** **80**	**2,50** **3,70** **68,79** **97,62**	**100.00** **2,60** **3,80** **70**	**100.00** **2,70** **3,90** **72**	**98.342.401.710,00**	-	-	-	-	-	-	**119.028.000.000,00**	-
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD* *Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD* *Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD* *Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD*	-			12 Dokumen 10 Dokumen 18 Poin 13 Poin 24 Poin 27 Poin	212.674.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum	-	675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	135.921.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	76.752.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi* *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD* *Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD*	-			5 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 21600 Dokumen 3360 OB 100 Persen 100 Persen	29.659.491.898,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	33.007.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3360 Orang/ Bulan	28.449.604.398,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		31.450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	279.944.400,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				21600 Dokumen	703.914.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		823.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	173.275.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				5 Dokumen	52.752.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* *Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD*	-			6 Laporan 2 Laporan 5 Dokumen 100 Persen	1.300.564.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	1.565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	338.199.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	680.653.300,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	281.711.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* *Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* *Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD*	-			75 Dokumen 120 Orang 12 Paket 100 Persen	1.794.044.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	1.540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	651.500.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		415.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				38 Dokumen	295.972.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		225.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				118 Orang	846.572.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	-			261 Dokumen 12 laporan 350 Laporan 12 Paket 12 Paket 12 Paket	9.879.274.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	12.881.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	597.202.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	570.009.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.387.653.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.767.655.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		6.145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	416.736.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		828.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				261 Dokumen	140.017.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		218.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* *Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			10 Unit 200 Unit 100 Persen	10.866.220.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	11.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	6.470.000.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				178 Unit	4.396.220.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* *Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			48 laporan 36 Laporan 12 Laporan 100 Persen	11.196.012.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	10.145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	376.619.700,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	4.195.855.675,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	6.623.536.800,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-			8 Unit 120 Unit 20 Unit 550 Unit	6.779.569.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum	-	7.141.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	1.298.085.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				120 Unit	3.074.404.900,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		2.955.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				550 Unit	860.023.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		636.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	1.547.056.000,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Biro Umum		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
		[Meningkatnya Dukungan Pelayanan Pimpinan]	**Tingkat Kepuasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah terhadap Pelayanan Biro Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**98.342.401.710,00**	-	-	-	-	-	-	**119.028.000.000,00**	-
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	-			24 OB 24 OB	4.036.416.517,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	1.239.619.917,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/ Bulan	2.796.796.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan* *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan* *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	-			84 Paket 84 Paket 84 Paket	10.275.576.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	18.805.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				84 Paket	4.144.878.940,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		5.340.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				84 Paket	3.312.843.940,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				84 Paket	2.817.853.740,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		8.965.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* *Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan*	-			800 Laporan 12 Laporan	10.349.435.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	15.796.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				0 Dokumen	0,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		0,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				800 Laporan	9.286.062.600,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		13.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	1.063.372.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.846.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara* *Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan*	-			12 Laporan 750 Laporan	1.993.121.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum	-	3.023.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				12 Laporan	769.247.100,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				750 Laporan	1.223.874.500,00	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretariat Daerah Biro Umum		1.548.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM
	J U M L A H							**150.445.106.844,00**							**224.044.424.000,00**	